

Katalog BPS : 4102004.3578

No Publikasi : 35780.1734

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2017



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA

<https://surabayakota.bps.go.id>

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA SURABAYA**

2017

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2017

Katalog BPS : 4102004.3578

No Publikasi : 35780.1733

Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : vi + 118

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :

BPS Kota Surabaya

Dicetak oleh :

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kota Surabaya 2017” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, SDKI dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Surabaya, Desember 2017
BPS Kota Surabaya



Kepala
Suparno

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin	2
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan	6
1.4 Penggunaan Alat Kontrasepsi	8
2. Kesehatan	11
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	12
2.2 Tingkat Imunitas Balita	15
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	18
3. Pendidikan	21
3.1 Angka Buta Huruf	22
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	24

4.4 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	43
.....	
4.5 Kelompok Umur	44
.....	
4.6 Upah/Gaji/Pendapatan Bersih	45
.....	
5. Taraf dan Pola Konsumsi	47
.....	
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	47
.....	
5.2 Konsumsi Energi dan Protein	52
.....	
6. Perumahan dan Lingkungan	55
.....	
6.1 Kualitas Rumah Tangga	56
.....	
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	58
.....	
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tangga	60
.....	
7. Kemiskinan	63
.....	
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur	64
.....	
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	66
.....	
7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga	68
.....	
7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga	71
.....	
7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga	72
.....	
8. Sosial Lainnya	77
.....	



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

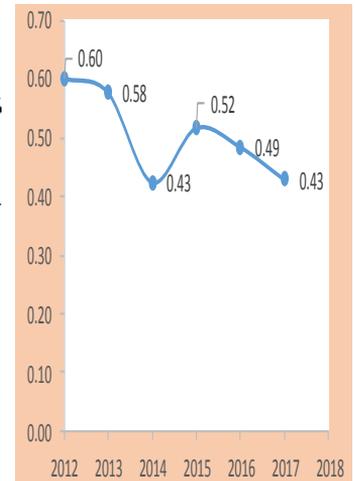
Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 tercatat sebanyak 2,87 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 12,29 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 2,86 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan tujuh tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Surabaya saat ini mengalami peningkatan sekitar 3,72 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 2,77 juta jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu tujuh tahun terakhir jumlah penduduk Kota Surabaya telah mengalami penambahan penduduk sebesar 103,08 ribu jiwa.

Gambar 1.1
Tingkat Pertumbuhan
Penduduk Kota Surabaya,
Tahun 2012-2017



Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin,
2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	2,81	0,60	97,69
2013	2,82	0,58	97,59
2014	2,83	0,43	97,54
2015	2,85	0,52	97,56
2016	2,86	0,49	97,63
2017	2,87	0,43	97,64

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Surabaya 2010-2035

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,43 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 0,60 persen dan menunjukkan *trend* menurun ditahun-tahun

selanjutnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Dilihat berdasarkan kecamatan, pada periode 2016-2017 laju pertumbuhan penduduk di 12 kecamatan berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai oleh Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Benowo dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,09 persen, diikuti Kecamatan Lakar Santri (2,08 persen). Sementara itu, 19 kecamatan mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah Kota Surabaya. Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk terendah dicapai oleh Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegal Sari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantian, masing-masing laju pertumbuhannya sebesar -0,51 persen.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 97,64. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Surabaya lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan, dari 31 kecamatan di Kota Surabaya, terdapat 10 kecamatan yang rasio jenis kelamin di atas 100, sisanya sebanyak 21 kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Kecamatan Mulyorejo (90,38) dan diikuti oleh Kecamatan Gubeng (90,95), Kecamatan Gayungan (91,21), Kecamatan Lakar Santri (94,03). Sementara itu, kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi pada tahun 2017 adalah Kecamatan Asem Rowo (104,21), Kecamatan Karang Pilang (103,04), Kecamatan Tenggilis (102,55), Kecamatan Kenjeran (101,99), Kecamatan Semampir (101,92).

1.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

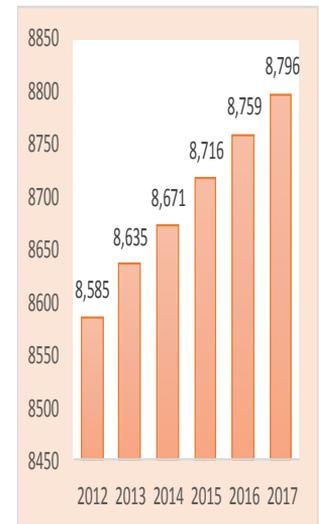
Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kota Surabaya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Surabaya sekitar 8.585 jiwa per km², tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 8.635 jiwa per km², selanjutnya pada tahun 2014 sekitar 8.671 per jiwa km², dan tahun 2015 sekitar 8.716 jiwa per km² serta tahun 2016 sekitar 8.759 jiwa per km². Sedangkan pada tahun 2017 kepadatan penduduk Jawa Timur sekitar 8.796 jiwa per km².

Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017, kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kota Surabaya yang mencapai sekitar 8.796 jiwa per km² diikuti Kota Mojokerto dan Kota Malang dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 7.728 jiwa per km² dan 5.929 jiwa

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kota Jawa Timur, Tahun 2012- 2017



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Surabaya 2010-2035

per km². Kemudian disusul Kota Pasuruan sekitar 5.602 jiwa per km² dan Kota Madiun sekitar 5.192 per km².

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk, 5 Kabupaten Terbesar di Provinsi Jawa Timur, 2017

Kabupaten	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk (per 1.000 km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Surabaya	2.874.699	326,81	9
Kota Mojokerto	127.279	16,47	8
Kota Malang	861.414	145,28	6
Kota Pasuruan	197.696	35,29	6
Kota Madiun	176.099	33,92	5

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tingginya rasio penduduk yang tinggal di Jawa Timur didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Malang. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak itu dan luas wilayahnya yang kurang dari 1 persen dari luas total wilayah daratan Jawa Timur menyebabkan kepadatan penduduk di kota Surabaya sangat tinggi.

Bila dilihat dari kecamatan, di Kota Surabaya terjadi ketimpangan distribusi penduduk . Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Simokerto sekitar 29.825 jiwa per km², kedua adalah Kecamatan Sawahan sekitar 25.454 jiwa per km². Selanjutnya disusul Kecamatan Kenjeran sekitar 23.744 jiwa per km², Kecamatan Bubutan sekitar 23.382 jiwa per km²., Kecamatan Tambaksari sekitar 23.269 jiwa per km². Adapun kecamatan yang kepadatannya di atas 10.000 jiwa per km² yaitu Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Semampir, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Genteng, Kecamatan Suko Manunggal.

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2012-2017 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2012 angka beban tanggungan Kota Surabaya sebesar 37,10 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 37 penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan Kota Surabaya pada periode 2013-2017 menunjukkan *trend* stabil, yaitu 37, artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 37 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi

tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	22,61	72,94	4,45	37,1
2013	22,61	72,94	4,46	37,1
2014	22,60	72,94	4,46	37,1
2015	22,60	72,94	4,46	37,1
2016	22,60	72,94	4,46	37,1
2017	22,60	72,94	4,47	37,1

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Kota
Surabaya

baya, Tahun 2012-2017

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Namun proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia tua (65+), dan angka beban ketergantungan menunjukkan *trend* yang stabil seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1.3. Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 72,94 persen. Penduduk usia produktif juga menunjukkan trend stabil. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Surabaya menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas pada periode 2012-2017 juga menunjukkan *trend* yang relatif stabil, yaitu sekitar 4,46 persen.

1.4 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaannya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 57,59 persen pada tahun 2015 dan 51,59 persen pada tahun 2016. Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2015 penggunaan suntikan mencapai 55,41 persen dan turun menjadi 52,94 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penggunaan pil justru mengalami peningkatan dari 21,29 persen pada tahun 2015 menjadi 22,61 persen pada tahun 2016.

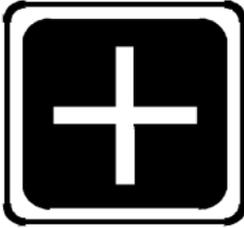
Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015 dan 2016

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	6,33	7,35
MOP/Vasektomi	0,28	0,22
AKDR/IUD/Spiral	11,04	9,48
Suntikan	55,41	52,94
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	1,71	2,73
Pil	21,29	22,61
Kondom/Karet	0,95	1,08
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0	0
Cara Tradisional	3,00	3,60
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	57,59	51,59

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Selain alat kontrasepsi suntikan dan pil, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah MOW/Tubektomi, AKDR/IUD/Spiral, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan cara Tradisional. Pada tahun 2015 penggunaan MOW/Tubektomi sebesar 6,33 persen dan meningkat menjadi sebesar 7,35 persen pada tahun 2016. Penggunaan AKDR/IUD/Spiral mengalami penurunan dari 11,04 persen pada tahun 2015 menjadi 9,48 pada tahun 2016. Penggunaan Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit mengalami peningkatan dari 1,71 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 2,73 pada tahun 2016. Penurunan beberapa alat kontrasepsi di atas kemungkinan peserta KB beralih alat kontrasepsi yang digunakan.

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah MOP/vasektomi dan kondom/karet, masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen., sedangkan alat/cara KB yang tidak pernah digunakan adalah intravag/tissue/kondom wanita. Hal ini diduga karena sosialisasi informasi masih kurang optimal sehingga banyak yang masih takut memilih alat kontrasepsi ini.



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

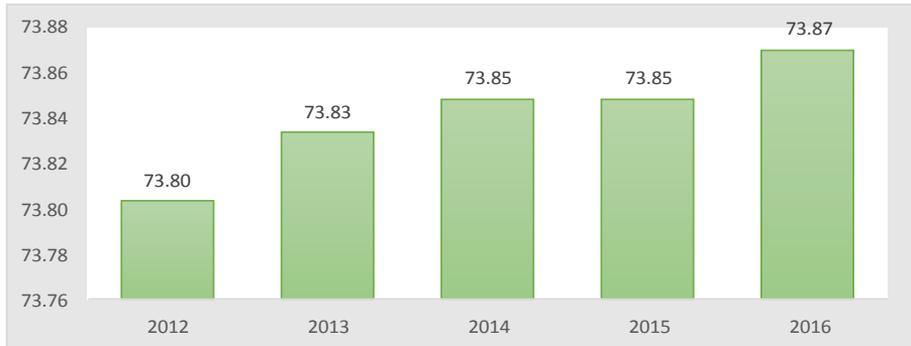
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Gambar 2.1

Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kota Surabaya

Angka Harapan hidup Kota Surabaya tahun 2016 cukup tinggi, yaitu 73,87. Dari hasil penghitungan propyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir (2012 – 2016) menunjukkan *trend* meningkat yaitu dari 73,80 (2012) menjadi 73,87 (2016).

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/ napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Surabaya mencapai 43,14 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,56 persen. Angka Kesakitan penduduk laki-laki tahun lebih tinggi dari penduduk perempuan, masing-masing sekitar 44,56 persen dan 41,84 persen. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi

keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

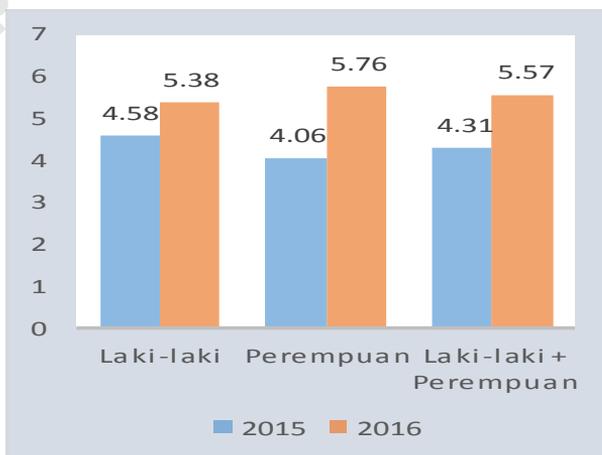
Hasil Susenas tahun 2015 dan 2016 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari. Selama tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa rata-rata lama sakit penduduk perempuan sedikit lebih lama dibandingkan penduduk laki-laki. Rata-rata lama sakit penduduk laki-laki pada tahun 2015 sekitar 4,58 hari dan naik menjadi 5,38 hari pada tahun 2016. Lamanya sakit di penduduk perempuan pada periode yang sama meningkat dari 4,06 hari menjadi 5,76 hari selama tahun 2015 -2016. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata lama Sakit Tahun 2015 – 2016

Daerah Tempat Tinggal	Angka Kesakitan (%)		Rata - Rata Lama Sakit	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	17,18	44,56	4,58	5,38
Perempuan	17,93	41,84	4,06	5,76
Laki-Laki + Perempuan	17,56	43,14	4,31	5,57

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Gambar 2.2 Rata-rata Lama Sakit (Hari), Tahun 2015-2016



Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

2.2 Tingkat Imunitas Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 2.2 Persentase Anak Usia 0 - 23 Bulan yang pernah disusui dan Lamanya disusui, Tahun 2015 – 2016

Daerah Tempat Tinggal	Anak Usia 0-23 bulan yang pernah disusui		Rata - Rata lama Disusui (bulan)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	92,06	86,47	9,63	10,21
Perempuan	94,35	87,85	8,75	10,67
Laki-Laki dan Perempuan	93,23	87,19	9,17	10,45

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2015 sekitar 9 bulan dan 2016 sekitar 10 bulan. Rata-rata lama bayi laki-laki dan bayi perempuan disusui pada tahun 2015 dan 2016 hampir sama, masing-masing untuk bayi laki-laki 9,63 bulan tahun 2015 dan 10,2 bulan tahun 2016, sedangkan bayi perempuan 8,75 bulan tahun 2015 dan 10,7 bulan tahun 2016 .

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar balita laki-laki usia 0-23 bulan mendapatkan tingkat imunitas dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan balita perempuan usia 0-23 bulan. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat secara alamiah bayi laki-laki lebih banyak minum ASI dari pada bayi perempuan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar system pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2015 dan 2016, mayoritas anak umur 12-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 80 persen. Namun, pada tahun 2015 balita yang mendapatkan imunisasi Campak masih di bawah 80 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 73,69 persen. Pada umumnya persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah diimunisasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di

imunisasi BCG pada tahun 2015 sebesar 92,77 persen turun menjadi sebesar 91,91 persen pada tahun 2016. Kemudian persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imuisasi DPT pada tahun 2015 sebesar 99,36 persen turun menjadi sebesar 87,67 persen pada tahun 2016. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi Polio pada tahun 2015 sebesar 100,00 persen turun menjadi sebesar 93,5 persen pada tahun 2016. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi Hepatitis B pada tahun 2015 sebesar 97,59 persen turun menjadi sebesar 87,08 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.3 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, Tahun 2015 – 2016

Jenis Iminusasi	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki dan Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	93,05	90,27	92,45	93,46	92,77	91,91
DPT	99,49	86,97	99,21	88,32	99,36	87,67
Polio	100,00	92,20	100,00	94,73	100,00	93,50
Campak	76,81	76,59	75,32	70,95	76,11	73,69
Hepatitis B	99,49	87,17	95,44	86,99	97,59	87,08

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita, karena kekurangan gizi pada balita akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak. Kasus gizi buruk umumnya menimpa balita dengan latar belakang ekonomi kurang/lemah. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Tabel 2.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Penolong Persalinan, Tahun 2015 – 2016

Penolong Persalinan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	98,70	100,00
- Dokter	58,41	42,76
- Bidan	40,29	57,24
- Lainnya	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	1,31	0,00
- Dukun Tradisional	1,31	0,00
- Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2015 – 2016

Tempat Berobat	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki dan Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	22,49	18,24	19,59	22,65	20,99	20,70
Praktek Dokter atau klinik	45,10	43,50	49,53	36,93	47,39	39,83
Puskesmas	34,22	37,91	30,34	36,23	32,21	36,97
UKBM	0,35	0,26	0,00	1,36	0,17	0,87
Pengobatan Tradisional	0,71	1,03	0,63	1,04	0,67	1,04
Dukun bersalin & lainnya	1,49	0,61	2,68	3,06	2,11	1,98

Sumber: Hasil Survei 2015-2016

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 98,7 persen pada tahun 2015 menjadi 100,00 persen di tahun 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran bidan sebagai penolong persalinan. Pada tahun 2015 penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter mendominasi sebesar 58,41 dari total persalinan, sedang pada tahun 2016 penolong persalinan didominasi oleh bidan sebesar 57,24 persen. Penolong persalinan oleh dukun tradisional terjadi terutama dari 1,31 persen pada tahun 2015 menjadi 0,00 persen pada tahun 2016.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tinggi persentase penduduk, baik laki-laki dan perempuan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik.

Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke tenaga kesehatan. Pada tahun 2016 penduduk laki-laki terjadi peningkatan dari 45,10 persen (2015) meningkat menjadi 43,5 persen (2016) sedangkan penduduk perempuan terjadi penurunan dari 49,53 persen (2015) menjadi 36,90 persen (2016). Puskesmas merupakan alternatif kedua tempat berobat, pada tahun 2015 sebesar 32,21 persen meningkat menjadi sebesar 36,97 persen (2016). Hal ini karena kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang mudah dijangkau dan yang tersedia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Tempat rujukan berobat rumah sakit pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 sebesar 20,99 persen menjadi sebesar 20,70 persen tahun 2015. Tempat berobat dukun bersalin & lainnya juga mengalami penurunan, dari 2,11 persen pada tahun 2015 menjadi 1,98 pada tahun 2016.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.



3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, serta angka putus sekolah dan angka mengulang.

3.1 Angka Buta Huruf

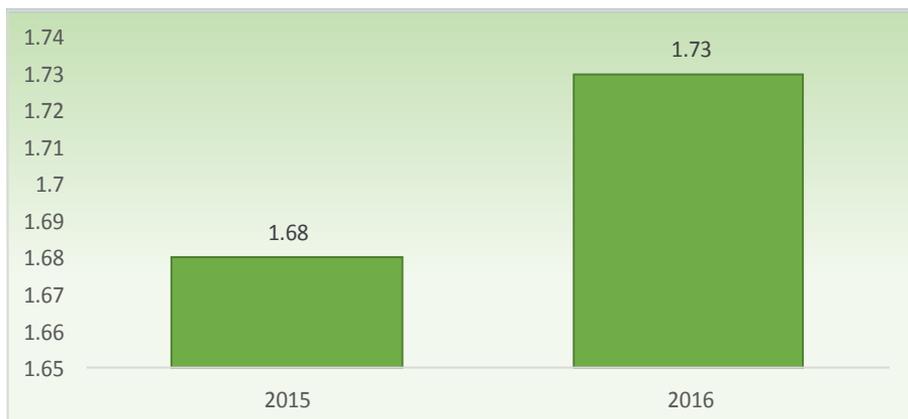
Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braille.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Surabaya tahun 2016 mencapai 1,73 persen. Dari penduduk usia di atas 15 tahun, sekitar 1,73 persen belum bisa membaca dan menulis. Angka buta huruf ini sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,68.

Angka buta huruf penduduk Kota Surabaya paling banyak pada penduduk perempuan kelompok usia di atas 45 tahun, yaitu 7,11 persen, penduduk laki-laki yang buta huruf pada kelompok umur ini sebesar 1,37 persen. Sedangkan pada kelompok usia 15-44 tahun angka buta hurufnya relatif kecil, yaitu penduduk perempuan sebesar 0,45 persen dan penduduk laki-laki sebesar 0,27 persen.

Dilihat dari jumlah penduduk miskin, tahun 2016 penduduk miskin Kota Surabaya yang buta huruf usia 15 - 24 tahun 0,00 persen, sedangkan untuk usia 15-55 tahun sebesar 1,71 persen. Berarti dari penduduk miskin di Kota Surabaya usia 15-55 tahun sekitar 1,71 persen belum bisa membaca dan menulis.

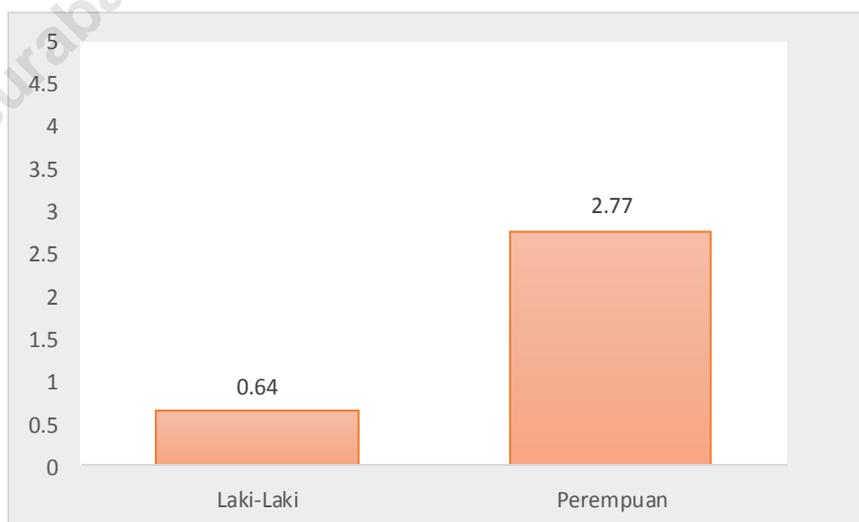
Gambar 3.1. Angka Buta Huruf Kota Surabaya, 2016 (Persen)



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Lebih lanjut pembahasan secara gender, angka buta huruf penduduk perempuan di Kota Surabaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka buta huruf penduduk perempuan tahun 2016 sebesar 2,77 persen, sedangkan angka buta huruf penduduk laki-laki sebesar 0,64 persen.

Gambar 3.2. Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota Surabaya, 2016 (Persen)



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

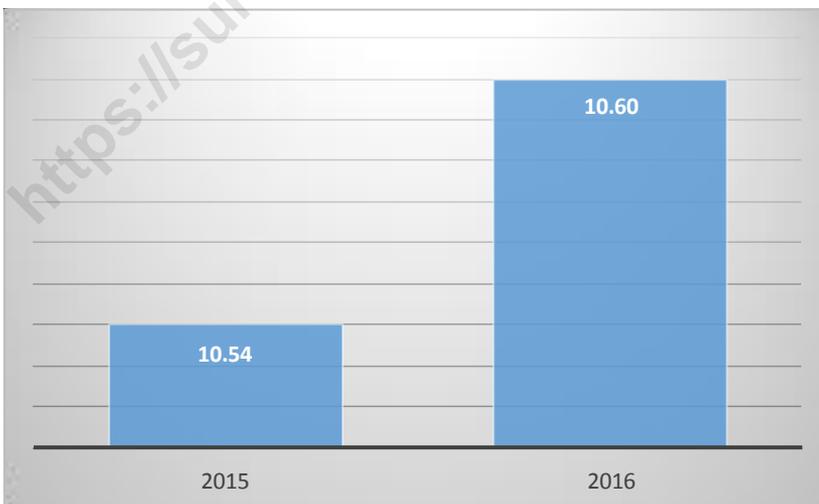
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa angka buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya dan lainnya.

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2016 mencapai 10,60 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Surabaya yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 10,60 tahun atau setara dengan kelas X tingkat SMA. Capaian ini sudah memenuhi target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah Kota Surabaya mengalami peningkatan dari 10,54 tahun pada 2015 menjadi 10,60 tahun pada 2016.

Secara gender, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan mencapai 10,16 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki mencapai 11,06 tahun.

Tabel 3.3. Rata-rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2015-2016 (Tahun)



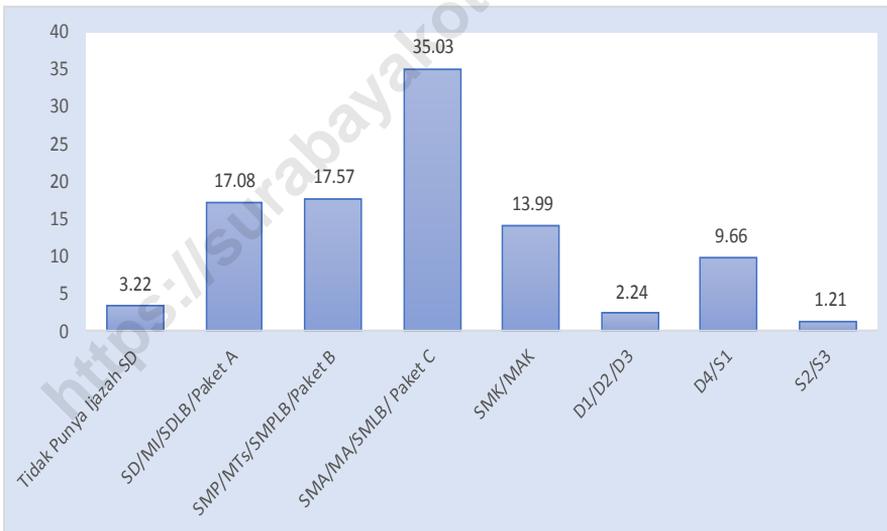
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

3.3 Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Surabaya tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 3,22 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 17,08 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 17,57 persen. Dengan demikian, sebanyak 37,87 persen penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP ke bawah.

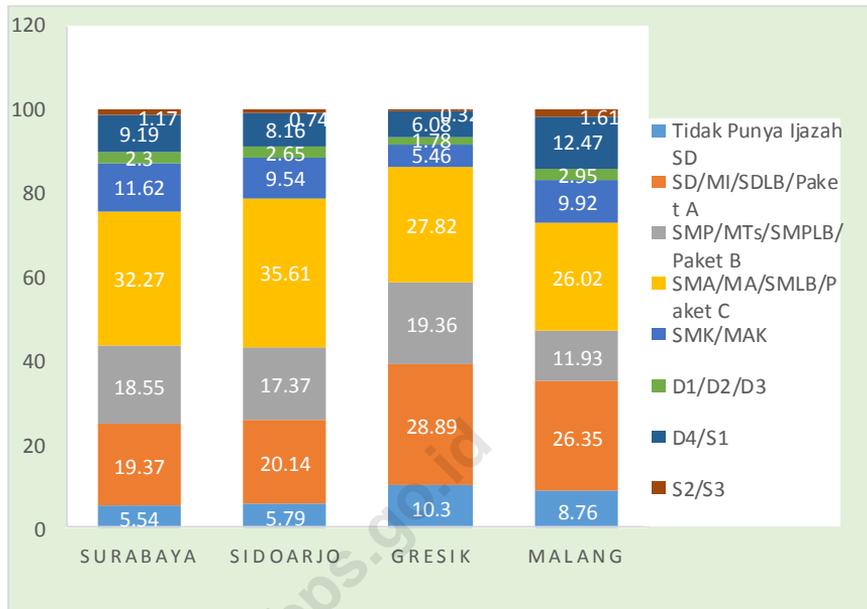
Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas 62,13 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajatnya sebesar 35,03 persen, sedangkan tamat diploma (D1/D2/D3), dan tamat sarjana ke atas, yang terbagi dalam D4/S1 dan S2/S3 masing-masing sebesar 2,24 persen, 9,66 persen dan 1,21 persen.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Gambar 3.5. Perbandingan Persentase Penduduk Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,



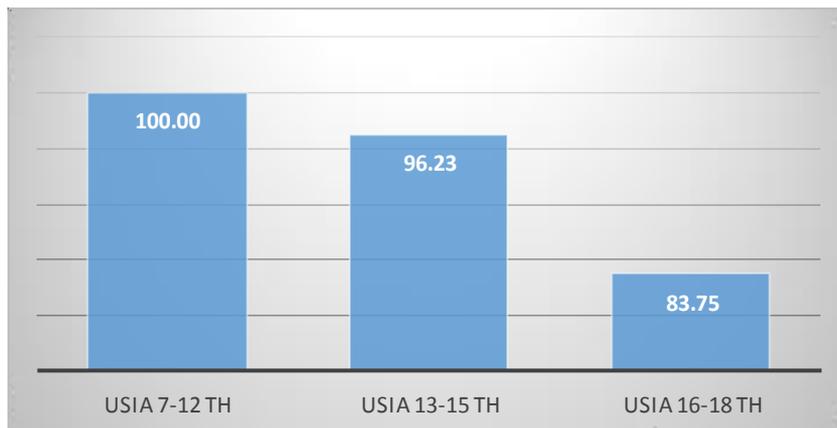
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah Kota Surabaya Menurut Kelompok Usia, 2016



Sumber: Susenas, 2016

Secara umum, APS Kota Surabaya per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.5. APS kelompok usia 7-12 tahun Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 100,00 yang berarti bahwa 100,00 persen atau semuanya penduduk Kota Surabaya usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 96,23 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kota Surabaya usia 13-15 tahun 96,23 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 83,75 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 16 persen penduduk Kota Surabaya usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan perguruan tinggi.

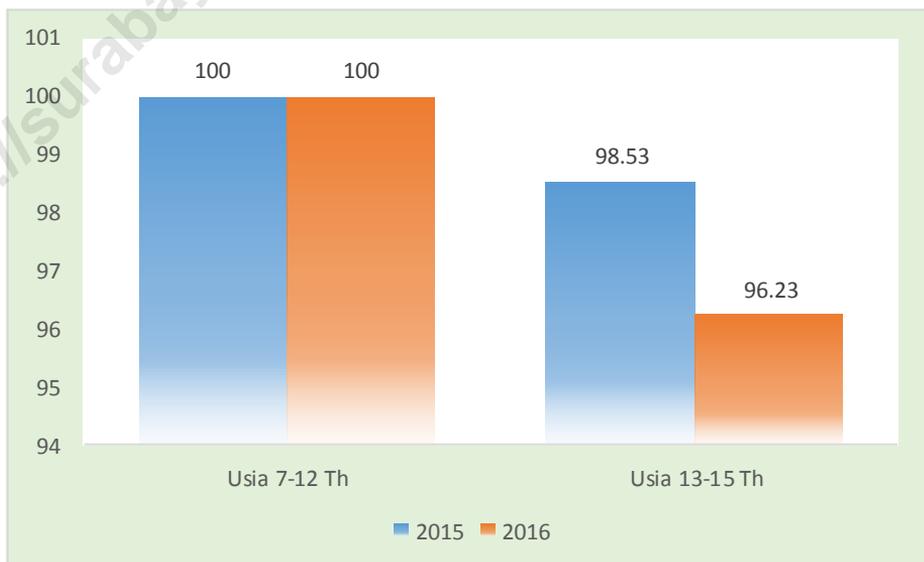
APS usia 7-12 tahun untuk tahun 2016 sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 100,00 persen. APS usia 13-15 tahun pada tahun 2016 turun dari 98,53 persen pada tahun 2015 menjadi 96,23 persen. Secara umum APS usia 7-12 tahun lebih besar dari pada APS usia 13-15 tahun. Demikian pula APS usia 13-15 tahun lebih tinggi dari pada APS usia 16-18 tahun. APS usia 16-18 tahun mengalami peningkatan dari 75,19 persen pada tahun 2015 menjadi 83,75 persen.

Secara umum APS laki-laki lebih tinggi daripada APS perempuan. Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS laki-laki sama dengan APS perempuan,

yaitu 100,00 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS laki-laki sedikit lebih tinggi dari pada APS perempuan, masing-masing sebesar 96,29 persen dan 96,13 persen. Pada kelompok usia ini nilai APS laki-laki dan perempuan tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tahun 2015. APS laki-laki tahun 2015 sebesar 100,00 persen dan APS perempuan sebesar 96,78 persen. Pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki meningkat dari 77,58 persen pada tahun 2015 menjadi 84,22 persen. Demikian juga dengan APS perempuan, mengalami peningkatan dari 72,81 persen menjadi 83,35 persen pada tahun 2016.

Pada kelompok usia dini APS laki-laki juga lebih tinggi dari pada perempuan. Pada kelompok usia 0-6 tahun, APS laki-laki sebesar 39,91 persen sedangkan APS perempuan sebesar 29,05 persen. Hal sama juga terjadi pada kelompok usia 3-4 tahun, APS laki-laki sebesar 42,35 persen dan APS perempuan sebesar 29,6 persen. Tingginya APS laki-laki dari pada perempuan hampir di semua jenjang kelompok umur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya dan lainnya.

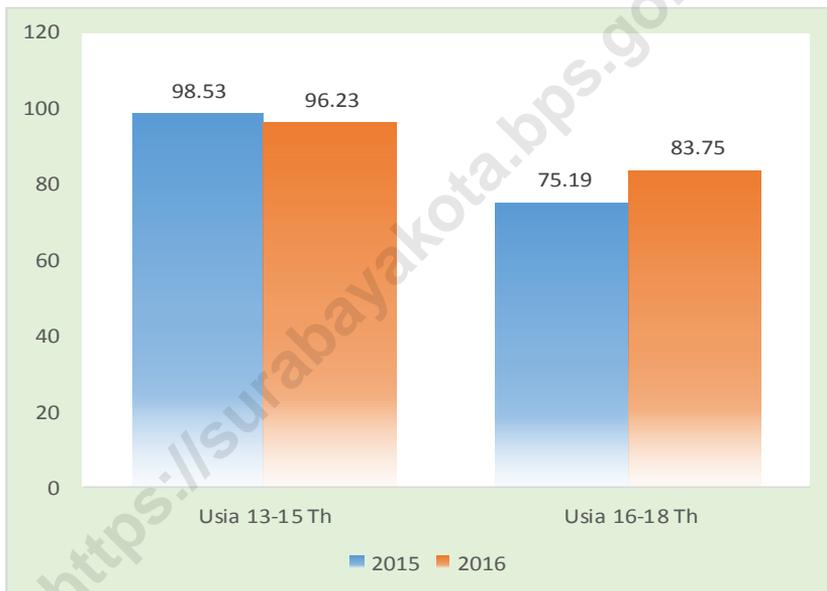
Gambar 3.7 APS 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun Kota Surabaya, Tahun 2015-2016



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

APS kelompok umur 16-18 tahun, baik pada tahun 2015 maupun 2016 lebih rendah dari pada APS kelompok umur 13-15 tahun. APS kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2016 sebesar 96,23 persen, angka ini turun sebesar 2,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 98,53. Berbeda dengan APS kelompok umur 16-18 tahun, APS kelompok umur ini mengalami peningkatan 8,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. APS kelompok umur 16-18 tahun meningkat dari 75,19 persen pada tahun 2015 menjadi 83,75 persen pada tahun 2016.

Gambar 3.8 APS 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun Kota Surabaya, 2016

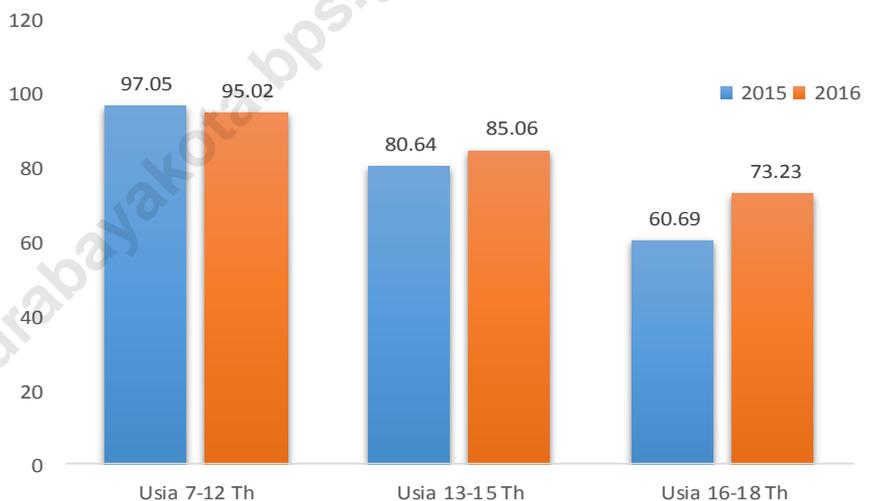


Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Secara ringkas, APM dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang yang sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai}} \times 100 \dots (1)$$

Gambar 3.9 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Surabaya, 2015-2016



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Secara umum APM menurut kelompok usia di Kota Surabaya ditunjukkan pada gambar 3.8. Penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 95,02 persen atau turun sebesar 2,03 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Sementara itu, penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2016 sebanyak 85,06 persen yakni naik sebe-

sar 4,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. APM kelompok usia 16-18 tahun di Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 73,23 persen, terendah dibandingkan APM kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun. APM kelompok usia 16-18 tahun sebesar 73,23 persen dapat diartikan penduduk Kota Surabaya tahun 2016 usia 16-18 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 73,23 persen.

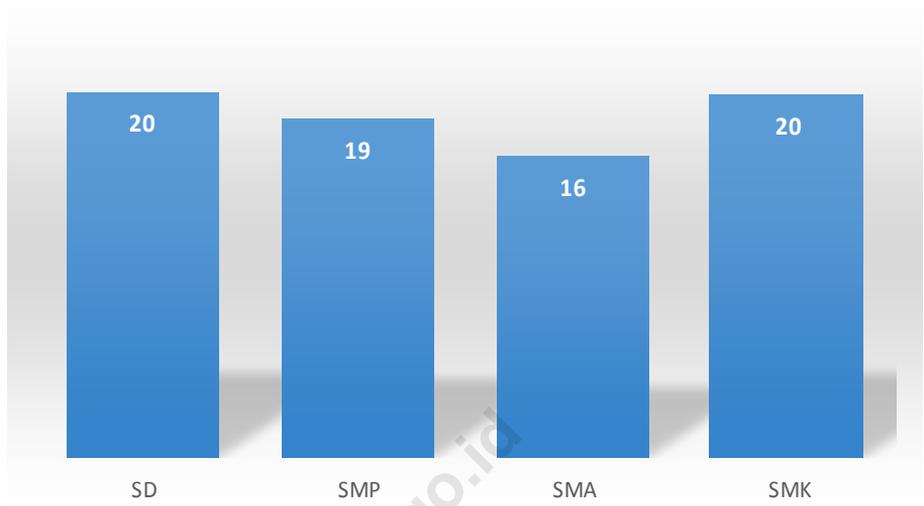
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

Gambar 3.10 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Surabaya,



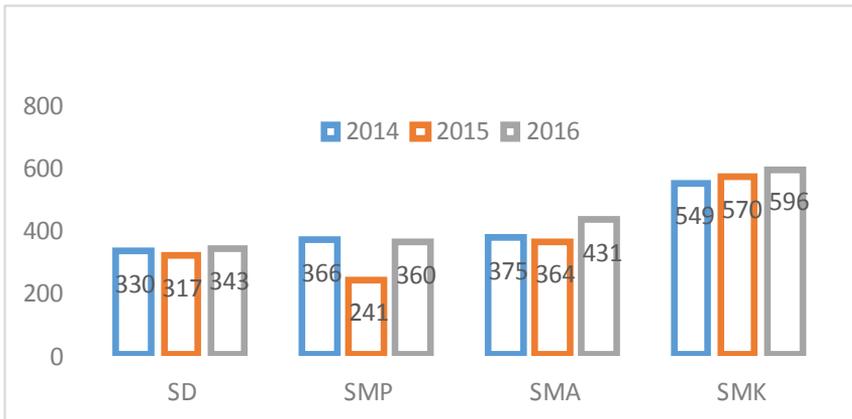
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Rasio murid/guru di Kota Surabaya pada tahun 2016 relatif hampir sama di tiap jenjang pendidikan. Rasio murid/guru pada jenjang SMA paling sedikit diantara yang lain, yaitu seorang guru SMA membimbing sekitar 16 murid. Sedangkan pada jenjang SMK, rasio murid/guru sebsar 20. Pada jenjang SD, setiap satu guru membimbing 20 orang siswa dan satu guru SMP membimbing 19 siswa.

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Surabaya semakin menurun. Hal ini disebabkan semakin banyaknya penambahan unit sekolah terutama sekolah swasta di Kota Surabaya selama periode 3 tahun terakhir.

Pada Grafik 3.10 tampak bahwa rasio murid/sekolah paling sedikit pada jenjang SD dan paling banyak pada jenjang SMK . Pada jenjang SD dan SMP, rata-rata setiap tahunnya satu sekolah menampung sekitar 300 siswa. Pada jenjang SMA rata-rata setiap tahunnya menampung hampir 400 siswa. Sedangkan pada

Gambar 3.11 Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Surabaya,



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.

<https://surabayakota.bps.go.id>



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Jawa Timur. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Februari dan Agustus tahun 2014-2015. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/ pendapatan bersih.

Faktor penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur disebabkan oleh adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/ usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

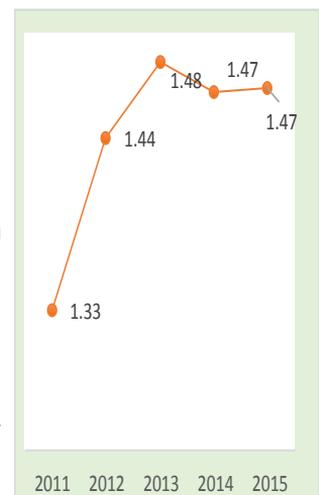
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) . Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 1,47 juta orang, naik sebanyak 2.592 orang dibanding tahun 2014. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini menunjukkan trend positif, hal ini sejalan dengan TPAK Kota Surabaya yang menunjukkan tren positif.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angkatan kerja Kota Surabaya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014, turun sekitar 17.841 orang dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 4.1
Jumlah Angkatan Kerja,
2011-2015 (Jutaan Orang)



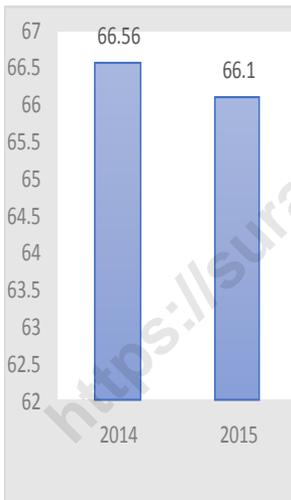
Sumber : BPS Kota Surabaya

Tabel 4.1 Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Tahun 2011 - 2015

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja (AK)	Ribu orang	1.334.419	1.437.448	1.483.343	1.465.502	1.468.094
Bekerja	Ribu orang	1.230.165	1.361.648	1.404.445	1.380.157	1.365.180
Pengangguran	Ribu orang	104.254	75.800	78.898	85.345	102.914
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,81	5,27	5,32	5,82	7,01

Sumber: BPS Kota Surabaya

Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2014-2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

TPAK Kota Surabaya 2015 sebesar 66,10, turun 0,46 persen dibandingkan TPAK tahun 2014. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 66,10 persen penduduk Kota Surabaya yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 33,90 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Pada bulan Agustus 2015 tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya meningkat sebesar 17 ribu orang dibanding Agustus 2014, dari 5,82 persen menjadi 7,01 persen. Tetapi jika dibanding Agustus 2011 sebesar 7,81 persen, masih turun sebanyak dua ribu orang.

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai pemicu antara lain penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Kota Surabaya dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kota Surabaya yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Kota Surabaya.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2015 terdapat tujuh kabupaten yang memiliki TPAK dibawah TPAK Kota Surabaya, yaitu Nganjuk, Ngawi, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun. Diantara ketujuh kabupaten/kota tersebut, TPAK terendah adalah Kota Malang, yaitu 60,56. Sebanyak 31 kabupaten/kota memiliki TPAK lebih tinggi dari pada TPAK Kota Surabaya. Diantara ketigapuluh satu kabupaten/kota tersebut yang memiliki TPAK paling tinggi adalah Kabupaten Pacitan dengan TPAK sebesar 80,64.

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya tahun 2015 sebesar 7,01. Nilai ini naik 1,19 persen bila dibandingkan TPT 2014 (5,82). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penurunan TPT cukup signifikan pada tahun 2012, yaitu dari 7,81 pada tahun 2011 menjadi 5,27. Setelah itu TPT menunjukkan trend naik tiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2011, TPT Kota Surabaya tahun 2015 turun sebesar 0,80 persen.

Pada tahun 2015 bila dilihat berdasarkan *gender*, penduduk laki-laki yang menganggur lebih banyak dari pada penduduk perempuan. TPT penduduk laki-laki terlihat lebih tinggi bila dibandingkan perempuan yaitu sebesar 7,45 persen, sementara TPT perempuan tercatat 6,32 persen. Dalam kurun waktu lima tahun, secara umum TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, hanya pada tahun 2011 TPT perempuan (9,53) lebih tinggi dari pada TPT laki-laki (6,82).

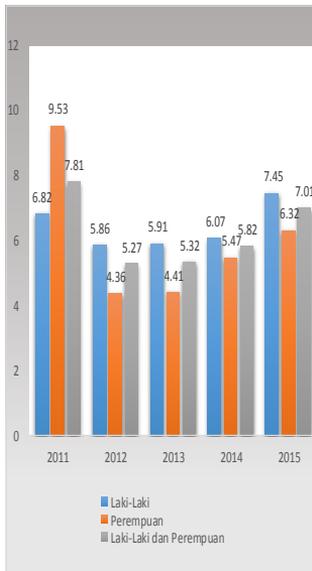
TPT laki-laki lebih tinggi dari pada TPT perempuan menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dan angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Tingginya pengangguran pada laki-laki ini

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2011-2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) , Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

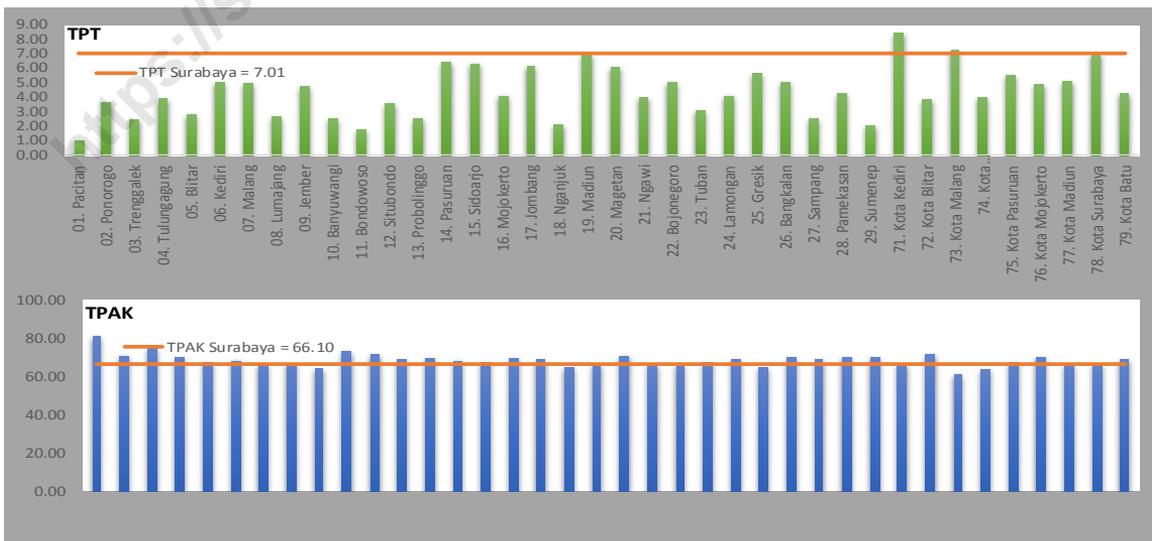
menunjukkan bahwa cukup banyak angkatan kerja laki-laki yang tidak terserap lapangan kerja.

Dilihat perbandingannya TPT Kota Surabaya dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, hanya Kota Kediri dan Kota Malang yang nilai TPT nya diatas Kota Surabaya, masing-masing sebesar 8,46 dan 7,28. Sebanyak 35 kabupten/kota di Provinsi Jawa Timur nilai TPT-nya dibawah TPT Kota Surabaya. TPT terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Pacitan sebesar 0,97.

Peningkatan TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur semakin bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Madiun sebesar 3,61 persen, dari 3,38 persen di tahun 2014 menjadi sebesar 6,99 persen di tahun 2015. Peningkatan TPT terbesar selanjutnya yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pamekasan masing-masing sebesar 2,42 persen dan 2,12 persen.

Kabupaten/kota yang memiliki angka TPT dibawah Kota Surabaya sebanyak 35 kabupaten/kota. Sebanyak 7 kabupaten/kota saja yang mempunyai angka TPAK dibawah Kota Surabaya. Sebanyak lima kabupaten/kota yang TPAK dan TPT nya dibawah Kota Surabaya, yaitu Kabu-

Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

paten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun.

4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

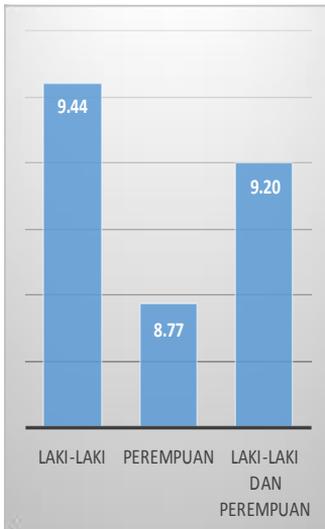
Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Untuk daerah perkotaan kenaikan TPT terjadi pada penduduk yang tidak /belum tamat SD yang naik sebesar 1,14 persen dari 0,86 persen pada tahun 2014 menjadi 2,00 persen pada 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan usaha untuk mereka yang tidak bersekolah semakin sedikit. Peningkatan TPT penduduk tamat SLTA cukup signifikan, yaitu sebesar 3,25 persen, dari 7,55 pada tahun 2014 menjadi 10,80 persen pada tahun 2015.

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk dengan pendidikan tamat SD, tamat SLTP, dan tamat perguruan tinggi mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 0,40 persen; 1,28 persen dan 1,24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, TPT untuk jenjang pendidikan minimal SMA mengalami peningkatan di tahun 2015.

TPT tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMA Kejuruan baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu sebesar 12,02 persen. Perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh solusi permasalahan ting-

Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pendidikan Mini-



Sumber : BPS Kota Surabaya

TPT Penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan SMU Kejuruan paling tinggi dibanding dengan TPT lulusan pendidikan lainnya baik di Perkotaan maupun Perdesaan

ginya TPT di Kota Surabaya yang didorong oleh tingginya angka TPT penduduk dengan jenjang pendidikan tamatan SMU Kejuruan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas lulusan SMA kejuruan sehingga mempunyai daya saing kerja.

TPT penduduk dengan pendidikan Diploma/Akademi yang mengalami penurunan sebesar 1,74 persen dari 5,16 persen menjadi 3,42 persen. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah lulusan diploma/akademi yang terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

TPT untuk penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan Universitas lebih tinggi dari pada TPT penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan diploma. TPT lulusan pendidikan universitas juga mengalami penurunan di tahun 2015. Tahun 2015 TPT lulusan universitas mengalami penurunan sebesar 1,25 persen dari 6,41 persen di tahun 2014 menjadi 5,16 persen di tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah lulusan universitas yang terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Lulusan pendidikan universitas laki-laki (5,02 persen) sedikit lebih banyak yang terserap di lapangan pekerjaan dari pada lulusan universitas perempuan (5,33 persen). Hal yang sama juga terjadi pada penduduk tamatan SMA Kejuruan, lulusan SMA kejuruan laki-laki yang terserap tenaga kerja lebih banyak 3,53 persen dari pada lulusan SMA Kejuruan perempuan. Nilai TPT lulusan SMA Kejuruan laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 10,95 persen dan 14,48 persen. Namun tidak demikian halnya dengan lulusan SMA yang terserap lapangan kerja. Lulusan SMA laki-laki yang terserap lapangan kerja lebih sedikit dari pada lulusan SMA perempuan. Nilai TPT lulusan SMA laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 10,52 persen dan 8,45 persen.

TPT penduduk Kota Surabaya yang pendidikannya minimal SMA pada tahun 2015 sebesar 9,20 persen. Sebesar 9,44 persen penduduk laki-laki Kota Surabaya belum/tidak terserap lapangan kerja, sedangkan

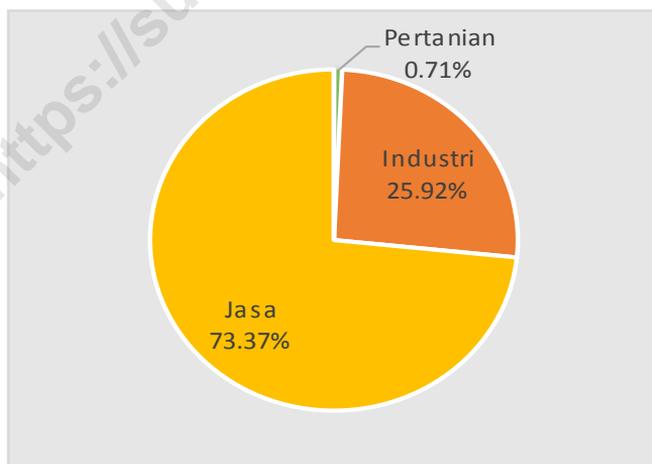
perempuan sebesar 8,77 persen. Diharapkan pemerintah daerah lebih berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Selain peran pemerintah daerah, peran dunia pendidikan serta swasta diharapkan juga dapat memberikan stimulus agar mendorong penduduk lebih mudah berwirausaha.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2015

Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	5,14	N.A	2,37
SD	2,18	3,79	2,90
SLTP	5,14	4,28	4,81
SLTA	10,72	10,97	10,80
Perguruan Tinggi	5,21	4,47	4,88
Total	7,48	6,45	7,08
SMA +	9,44	8,77	9,20

Sumber: BPS Kota Surabaya

Gambar 4.7 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha,



Sumber: BPS Kota Surabaya

4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (Pertanian, kehutanan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil Sakernas 2015, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor industri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 23,51 persen menjadi 25,92 persen. Penurunan terjadi di sektor jasa sebesar 75,50 persen di tahun 2014 menjadi 73,37 persen di tahun 2015. Hal yang sama terjadi pada sektor pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor ini turun sebesar 0,28 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, turun dari 0,99 persen di tahun 2014 menjadi 0,71 persen di tahun 2015. Namun secara keseluruhan, sektor jasa tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2015 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini menunjukkan tidak/belum terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Surabaya. Secara umum jumlah penduduk laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dari pada perempuan di semua sektor. Terutama di sektor indus-

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015

Kelompok Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	5.936	3.807	9.743
Industri	258.353	95.468	353.821
Jasa	564.418	437.198	1.001.616
	828.707	536.473	1.365.180

Sumber : Sakernas, BPS Kota Surabaya

try, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja di sektor ini sekitar 2,7 kali lipat jumlah penduduk perempuan yang bekerja di sektor ini.

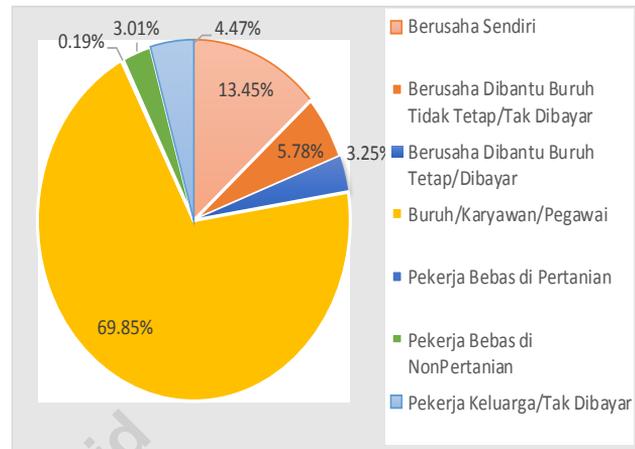
Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 69,85 persen atau mengalami peningkatan sebesar 5,43 persen, dari 64,41 persen di tahun 2014 menjadi 69,85 persen di tahun 2015. Sebaliknya terjadi penurunan pada status pekerjaan lainnya di tahun 2015. Jumlah

pekerja berusaha sendiri mengalami penurunan sebesar 4,81 persen dari 18,26 persen di tahun 2014 menjadi 13,45 persen di tahun 2015. Begitu pula dengan jumlah Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar juga mengalami penurunan dari 4,29 persen menjadi 3,25 persen. Serta pekerja keluarga, turun sebesar 0,28 persen, dari 4,75 persen tahun 2014 menjadi 4,47 tahun 2015.

4.5. Kelompok Umur

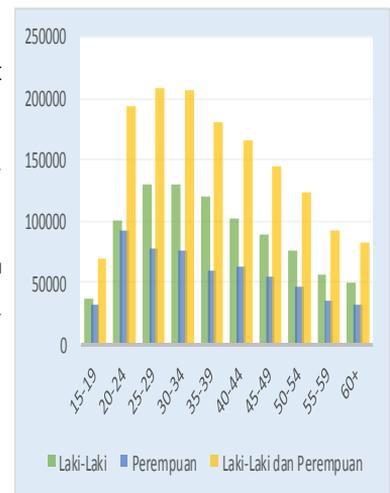
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, sep-

Gambar 4.8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

Gambar 4.9 Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur, 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

erti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan sebagainya.

Pada Gambar 4.8 ditampilkan angkatan kerja menurut kelompok umur Kota Surabaya tahun 2015. Dari grafik tersebut tampak bahwa angkatan kerja Kota Surabaya didominasi kelompok umur 25-29 tahun sebesar 14,19 persen. Selanjutnya kelompok umur 30-34 tahun dan 20-24 tahun masing-masing sebesar 14,07 persen dan 13,24 persen. Paling sedikit pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebesar 4,71 persen. Hal ini karena pada usia tersebut mayoritas angkatan kerja masih sekolah. Sedangkan jumlah angkatan kerja kelompok umur 60+ sebesar 5,60 persen. Nilai ini lebih banyak 0,89 persen dari pada jumlah angkatan kerja pada kelompok umur 15-19 tahun.

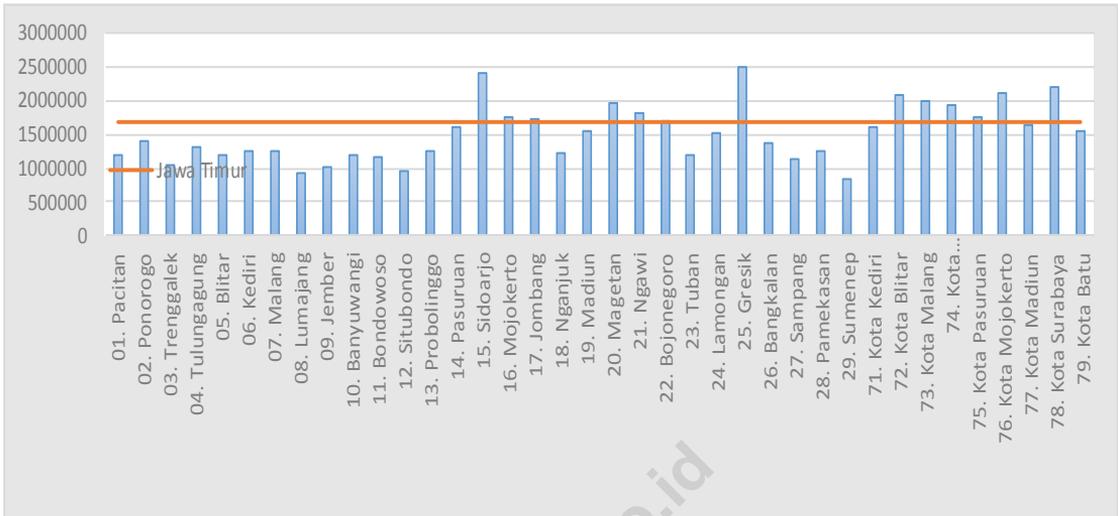
Pada angkatan kerja menurut kelompok umur, secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan. Namun pada kelompok umur 15-19 tahun jumlah perempuan lebih banyak 1,29 persen dari pada laki-laki, yaitu 5,50 persen dan jumlah laki-laki sebesar 4,21 persen. Demikian halnya pada kelompok umur 20-24 tahun, jumlah perempuan lebih banyak 4,99 persen, yaitu 16,29 persen dan jumlah laki-laki 11,30 persen. Selisih terkecil antara jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan pada kelompok umur 55-59 tahun, yaitu sebesar 0,06 persen.

4.6. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih sebulan menurut kabupaten/kota secara umum, sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki upah diatas upah Provinsi Jawa Timur. Diantara 13 kabupaten/kota tersebut yang paling tinggi adalah upah Kabupaten Gresik, kemudian Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Sedangkan upah terkecil di Kabupaten

Gambar 4.10 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

Bila dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan berdasarkan jenis kelamin terjadi kenaikan dalam kurun waktu 2013-2015. Untuk pekerja perempuan rata-rata upah meningkat sebesar 12,45 persen dari Rp. 1,56 juta per bulan menjadi sebesar Rp. 1,75 juta di tahun 2015. Begitu pula untuk pekerja laki-laki juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2014 rata-rata upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan sebesar Rp. 2,06 juta di tahun 2014 menjadi Rp. 2,45 juta atau meningkat sebesar 18,81 persen. Sedangkan secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 17,66 persen, dari Rp. 1,87 juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.20 juta di tahun 2015.

Gambar 4.11 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013 – 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya



5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Kota Surabaya mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Gambar 5.1
Persentase Pengeluaran
Perkapita Sebulan
Menurut Jenis Pengeluaran,



Sumber: BPS Kota Surabaya

**Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran,
Tahun 2015-2016**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	581.474	727.886	33,75	39,94
Bukan Makanan	1.141.526	1.094.588	66,25	60,06
- Perumahan	671.157	621.405	38,95	34,10
- Barang dan Jasa	288.743	283.574	16,76	15,56
- Pakaian	32.893	39.443	1,91	2,16
- Barang Tahan Lama	59.745	67.701	3,47	3,71
- Lainnya	88.979	82.467	5,16	4,53
Jumlah	1.722.999	1.822.474	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2015-2016 diolah

Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2015-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 1.722.999,- menjadi Rp 1.822.474,-. Dimana pada tahun 2015 sekitar Rp. 581.474,- atau 33,75 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 1.141.526,- atau 66,25 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2016 sekitar Rp. 727.886,- atau 39,94 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp. 1.094.588,- atau 60,06 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan justru mengalami peningkatan dan sebaliknya pengeluaran bukan makanan sedikit menurun. Meskipun pengeluaran untuk makanan sedikit meningkat, namun secara keseluruhan pengeluaran non makanan tetap memegang porsi terbesar. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi penghasilan rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada pakaian dan barang tahan lama dari masing-masing 1,91 persen dan 3,47 persen pada tahun 2014 menjadi 2,16 persen dan 3,71 persen pada tahun 2015.

Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka biasanya pengeluaran makanan semakin sedikit dan pengeluaran non makanan semakin besar. Persentase pengeluaran makanan yang lebih rendah dan persentase pengeluaran non makanan yang lebih tinggi dari pada Kota Surabaya adalah Kota Madiun dan Kota Malang. Persentase pengeluaran makanan dan non makanan Kota Malang, masing-masing sebesar 38,63 persen dan 61,37 persen. Sedangkan persentase pengeluaran makanan Kota Madiun sebesar 38,15 persen dan persentase pengeluaran non makanan sebesar 61,85 persen.

Sementara itu, rata-rata pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2016 mengalami kenaikan, yaitu Rp. 1.822.474,- per kapita sebulan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.722.999,- per kapita sebulan, atau naik sebesar 5,77 persen (sekitar Rp. 99.475,-). Kenaikan ini terbanyak terjadi pada golongan pengeluaran per kapita diatas Rp. 1.000.000,- sebesar 13,81 persen dan golongan pengeluaran Rp. 200.000,- hingga Rp. 299.999,- sebesar 0,18 persen.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), Tahun 2014-2015

Golongan Pengeluaran per Kapita	2015	2016
(1)	(2)	(3)
< 100 000	0,00	0,00
100 000 - 149 999	0,00	0,00
150 000 - 199 999	0,00	0,00
250 000 - 299 999	0,64	0,82
300 000 - 399 999	9,76	7,24
500 000 - 749 999	16,82	9,41
750 000 - 999 999	15,49	11,44
> 1 000 000	57,29	71,10
Rata-rata per Kapita	1.722.999	1.822.474

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Data Susenas 2014-2015 diolah

Kota Surabaya adalah kota yang besar dengan biaya hidup yang relatif tinggi, oleh karena itulah tidak terdapat rumah tangga Kota Surabaya yang memiliki goongan pengeluaran perkapita sebulan kurang dari Rp. 199.999,- . Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki kelompok pengeluaran per kapita sebulan Rp. 300.000,- s/d Rp. 499.999,- ; Rp. 500.000,- s/d Rp. 749.999,- ; Rp. 750.000,- s/d Rp. 999.999,- mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai persentase kelompok pengeluaran tersebut pada tahun 2016 masing-masing sebesar 7,24 persen, 9,41 persen, dan 11,44 persen.

Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran kelompok padi-padian penduduk kota Surabaya adalah yang terbesar dibandingkan kelompok lainnya, yaitu Rp. 62.508,-. Selanjutnya kelompok daging sebesar Rp 52.804,-. Lalu kelompok telur dan susu sebesar Rp. 47.217,-. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Surabaya paling kecil pada kelompok umbi-umbian sebesar Rp. 6.825,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang mengalami peningkatan terbesar adalah kelompok daging dengan peningkatan sebesar Rp. 12.381,-. Sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah kelompok telur dan susu dengan penurunan sebesar RP. 10.850,-.

Tabel 5.3 Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Kota Surabaya (Rupiah), Tahun 2015-2016

Jenis Pengeluaran Makanan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	65.153	62.508
Umbi-Umbian	4.271	6.825
Ikan	38.757	43.779
Daging	40.423	52.804
Telur dan Susu	58.067	47.217
Sayur-Sayuran	30.116	40.315
Kacang-Kacangan	17.042	17.679
Buah-Buahan	31.508	34.493
Minyak dan Lemak	14.749	15.229
Bahan Minuman	17.718	20.067
Bumbu-Bumbuan	7.978	10.531

Sumber: BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2015-2016 diolah

Masyarakat perkotaan dan perdesaan tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, tetapi juga berbeda dalam hal pola konsumsi. Hal ini dikarenakan perbedaan pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh berbagai lapisan masyarakat. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada ketimpangan tingkat kemakmuran antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Ketimpangan tingkat kemakmuran antar lapisan masyarakat ini dapat diukur dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatan pengeluaran. Data pendapatan yang sulit diperoleh karena sulitnya mendapatkan pengakuan dari responden, menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran

Tabel 5.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Tahun 2014 -2016

Tahun	40 % Terendah	40 % Menengah	20 % Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	16,65	32,39	50,96	0,39
2015	14,82	33,50	51,68	0,42
2016	17,16	35,66	47,18	0,39

Sumber: BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2015-2016 diolah

Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat bahwa distribusi pengeluaran pada kelas 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah, selama periode 2014 hingga 2016 terjadi fluktuatif, yaitu dari 16,65 persen di tahun 2014 turun menjadi 14,82 persen pada tahun 2015 kemudian naik kembali pada tahun 2016 menjadi 17,16 persen. Menurut kriteria Bank Dunia, keadaan ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan pada level sedang. Meskipun tetap pada kategori ketimpangan sedang, pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi fluktuatif yaitu dari 50,96 persen di tahun 2014 menjadi 51,68 persen pada tahun 2015 dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 47,18 persen.

Sementara Indeks Gini sejak tahun 2014 hingga 2016 cukup fluktuatif yaitu sebesar 0,39 di tahun 2014, meningkat menjadi 0,42 di tahun 2015 dan kembali turun menjadi 0,39 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran cenderung fluktuatif, namun masih dalam level sedang.

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi energi dan protein. Jumlah konsumsi energi dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein per hari.

Selama periode 2015-2016 penduduk Kota Surabaya mengalami peningkatan konsumsi energi/kalori per hari sebesar 132,39 kkal.

Pada tahun 2015 penduduk Kota Surabaya hanya mampu mengonsumsi energi/kalori rata-rata per hari hanya sebesar 1.936,84 kkal dan tahun 2016 menjadi 2.069,23 kkal, sedikit lebih tinggi dari tahun 2015. Ini berarti konsumsi energi per hari penduduk Kota Surabaya di tahun 2015 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kota Surabaya juga masih relatif kecil, yaitu dari 59,11 gram pada tahun 2015 dan naik 3,59 gram menjadi 62,7 gram pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan konsumsi protein Kota Surabaya sudah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan yaitu 57

Tabel 5.5 Rata-rata Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita Sehari, 2015-

Tahun	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Energi (kkal)	1.936,84	2.069,23
Protein (gram)	59,11	62,70

Sumber: BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2015-2016 diolah



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas pen-
erangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kual-
itas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial
ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya
baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka
yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Susenas 2016, persentase rumah tangga di
Kota Surabaya yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan sedikit pen-
ingkatan. Pada tahun 2016, rumah yang berlantaikan bukan tanah
meningkat menjadi sebesar 99,70 persen dibandingkan tahun 2015
sebesar 99,64 persen.

**Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan,
2015 dan 2016**

Indikator Kualitas Perumahan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	99,64	99,70
Atap beton, genteng, sirap dan asbes (%)	100,00	100,00
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	98,72	99,22
Rata-rata luas lantai per kapita (m ²)	24,58	27,51

Sumber: BPS Kota Surabaya

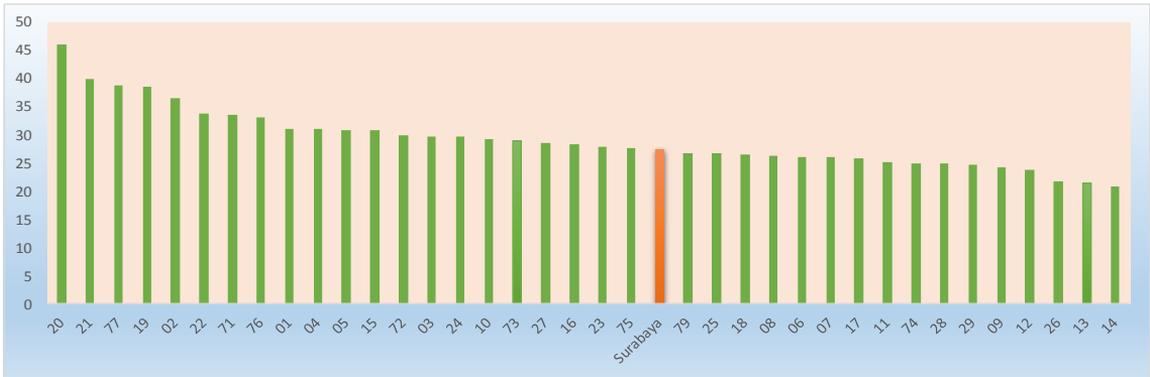
Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2015 semua rumah tempat tinggal beratap beton, genteng, sirap dan asbes di Kota Surabaya atau sudah 100,00 persen, demikian halnya pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 kualitas perumahan di Kota Surabaya jika dilihat dari indikator dinding terluas tembok dan kayu telah meningkat menjadi sebesar 99,22 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar 98,72 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan Kategori rumah sehat (menurut Kemenkes, 2005), adalah rumah yang memiliki luas lantai minimum 8 m² perkapita, mempunyai kualitas bangunan yang baik, berada dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi, serta memiliki penataan ventilasi yang cukup untuk keluar masuknya udara dan sinar matahari.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, rata-rata luas lantai per kapita di Kota Surabaya pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 27,51 m² dibanding tahun 2015 sebesar 24,58 m² atau mengalami peningkatan sebesar 2,93m².

Gambar 6.1 Persentase Rata-rata luas lantai per kapita menurut Kabupaten/Kota (%), 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016 jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota terdapat 21 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita yang lebih tinggi dari Kota Surabaya. Kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita tertinggi adalah kabupaten Magetan (46,01 m²), kabupaten Ngawi (39,86 m²) dan kota Madiun (38,75 m²). Dan sisanya sebanyak 16 kabupaten/kota di bawah persentase Kota Surabaya, dimana kabupaten Pasuruan memiliki persentase rata-rata luas lantai per kapita terendah yaitu sebesar 20,88 m².

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2015, semua rumah tangga di Kota Surabaya yang menggunakan air minum bersih, dengan kata lain telah mencapai 100,00 persen. Demikian halnya dengan tahun 2016. Sementara jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng

pada tahun 2016, sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, yakni dari 99,46 persen pada tahun 2015 menjadi 99,58 pada tahun 2016.

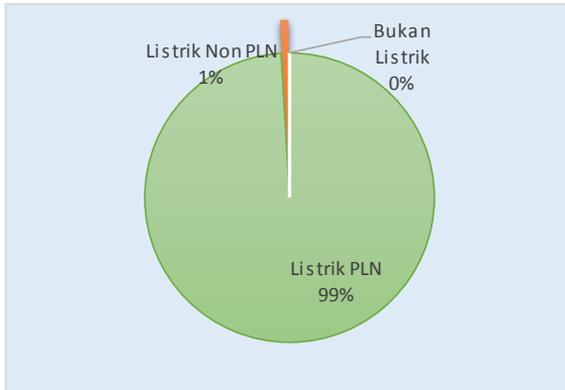
Tabel 6.2. Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2015 dan 2016

Indikator Fasilitas Perumahan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	99,46	99,58
Air minum bersih	100,00	100,00
Jamban sendiri	73,92	73,32
Jamban sendiri dengan tangki septik	92,29	95,72
Sumber penerangan listrik	10,00	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 95,72 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 (92,29 persen).

Gambar 6.2 Sumber Penerangan di Kota Surabaya, 2016



Sumber: BPS Kota Surabaya

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Pada tahun 2016 semua rumah tangga di Kota Surabaya telah menikmati fasilitas penerangan listrik, dengan kata lain sebesar 100,00 persen. Hampir seluruh sumber penerangan berasal dari listrik PLN, dengan rincian 99,07 persen listrik PLN dan 0,93 persen listrik non PLN.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Kota Surabaya berdasarkan hasil Susenas 2016 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 63,69 persen dan

sisanya sebesar 36,31 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 23,24 persen, bebas sewa sebesar 9,21 persen, rumah dinas dan lainnya masing-masing sebesar 1,33 persen dan 2,53 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 0,24 persen. Kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap semakin bertambahnya rumahtangga yang memiliki rumah sendiri, seperti salah satunya kebijakan tentang penyediaan rumah sederhana untuk masyarakat menengah ke bawah ataupun juga dari sisi pendanaan seperti pengurangan suku bunga pinjaman, pemberian kredit ringan dan sebagainya. Meskipun demikian, kenakannya sangat sedikit, hal ini dikarenakan sangat mahalnya harga tanah dan rumah di Kota Surabaya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepemilikan rumah dengan status bebas sewa turun 3,13 persen, yaitu menjadi 9,21 persen di tahun 2016 dari 12,34 di tahun 2015. Disisi lain terjadi peningkatan kepemilikan rumah dengan status rumah dinas dan lainnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 1,33 persen dan 2,23 persen. Rumah dinas dari 0,00 persen di tahun 2015 menjadi 1,33 persen di tahun 2016. Status kepemilikan lainnya dari 0,3 persen di tahun 2015 menjadi 2,53 persen di tahun 2016.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2015 dan 2016

Indikator Fasilitas Perumahan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	63,45	63,69
Kontrak/sewa	23,91	23,24
Bebas Sewa	12,34	9,21
Rumah Dinas	0,00	1,33
Lainnya	0,30	2,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

<https://surabayakota.bps.go.id>



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur

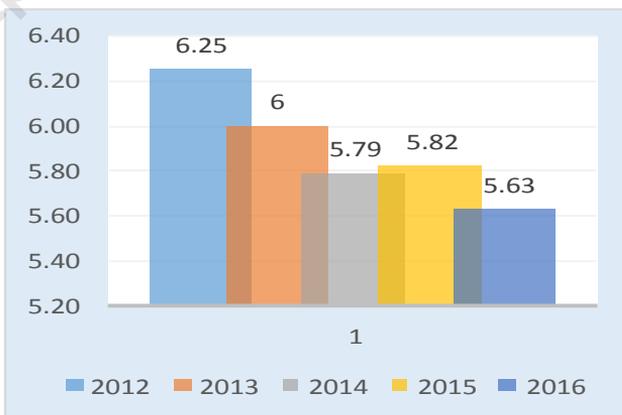
Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di kota Surabaya, 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)		
2012	175,70	6,25
2013	169,40	6,00
2014	164,36	5,79
2015	165,72	5,82
2016	161,01	5,63

Sumber: BPS Kota Surabaya

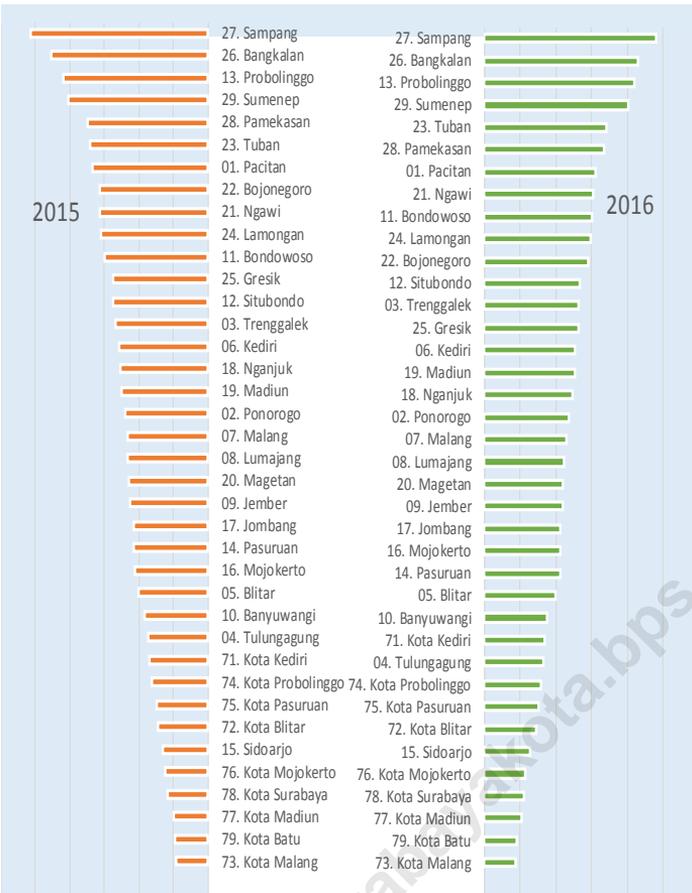
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam misinya, *Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur, 2011-2015 (Persen)



Sumber: BPS Kota Surabaya

Gambar 7.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

Selama tahun 2012-2016, persentase penduduk miskin di Kota Surabaya cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2012 penduduk miskin Kota Surabaya sebesar 6,25 persen, kemudian turun menjadi 6,00 persen pada 2013. Lalu turun sebesar 0,21 persen menjadi 5,79 pada 2014. Tapi pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,03 persen menjadi 5,82 persen. Kemudian pada tahun 2016 turun lagi menjadi 5,63 persen.

Selama periode 2015 dan 2016 peringkat kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan persentase penduduk miskinnya tidak mengalami perubahan yang berarti, terdapat beberapa kabupaten yang peringkatnya bergeser, namun tidak ada yang bergesernya cukup signifikan. Beberapa kabupaten/kota saling bertukar tempat, misalnya Kabupaten Tulung Agung dan Kota Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten

Pasuruan, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten dan Kabupaten Madiun, serta Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Gresik pada tahun 2015 di peringkat 27 menjadi peringkat 25 pada tahun 2016 dengan persentase jumlah penduduk miskin dari 13,6 persen menjadi 13,2 persen pada 2016. Kabupaten Bojonegoro pada peringkat 28 pada tahun 2016, dari peringkat 31 dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 sebesar 15,7 persen turun menjadi 14,6 persen pada 2016. Sedangkan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 pada peringkat 28, turun 2 peringkat menjadi peringkat 30 pada tahun 2016, namun persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Bondowoso sama pada tahun 2015 dan 2016, yaitu 15 persen.

Kabupaten di wilayah Madura memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding daerah lain. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 24,1 persen, ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur, diikuti Kabupaten Bangkalan 21,4 persen; Kabupaten Probolinggo 21,0 persen; Kabupaten Sumenep 20,1 persen; Kabupaten Tuban 17,1 persen; dan Kabupaten Pamekasan 16,7 persen.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan antar waktu selama 2012-2016.

Garis kemiskinan Kota Surabaya pada 2012 sebesar Rp. 339.208. Besarnya garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun berikutnya naik 9,82 persen atau sekitar Rp. 33.303, menjadi Rp. 372.511 pada tahun 2013. Kemudian dari tahun 2013 ke 2014, garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan sekitar 5,54, yaitu sebesar Rp. 20.640, menjadi Rp. 393.151.

Garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar Rp. 418.930, lebih besar Rp. 25.779 dari garis kemiskinan tahun sebelumnya atau sekitar 6,56 persen. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kota Surabaya Rp. 438.283, mengalami peningkatan 4,62 persen, lebih besar Rp. 19.353 dari garis kemiskinan tahun 2015.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P_1 , dan

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Jawa Timur, 2013-2015

Tahun	Garis Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	393.208	1,00	0,25
2013	372.511	0,68	0,13
2014	393.151	0,78	0,16
2015	418.930	0,78	0,15
2016	438.283	0,92	0,25

Sumber: BPS Kota Surabaya

keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kota Surabaya mencapai 1,00 pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kota Surabaya turun 0,32 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 0,68. Selanjutnya pada tahun 2014 Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kota Surabaya kembali naik 0,10 poin menjadi 0,78. Pada tahun 2015, Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kota Surabaya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu tetap pada angka 0,78. Pada tahun 2016 Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kota Surabaya kembali mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 0,92. Kenaikan P_1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan kata lain penduduk Kota Surabaya mengalami kemiskinan yang semakin dalam.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Surabaya memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) antar waktu. Pada tahun 2012 nilai Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Surabaya sebesar 0,25. Selanjutnya turun 0,12 poin pada tahun berikutnya, menjadi 0,13. Pada tahun 2014 nilai Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Surabaya menjadi 0,16 atau naik 0,03 poin dari tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 sedikit turun sebesar 0,01 poin, nilai Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Surabaya 0,15. Pada tahun 2016 Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Surabaya kembali naik 0,1 poin dari tahun sebelumnya, menjadi

0,25. Nilai P_2 yang cenderung meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga jika kesempatan menikmati pendidikan dimiliki oleh anggota rumah tangga miskin, maka kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan di masa yang akan datang akan semakin besar.

Karakteristik pendidikan penduduk miskin di Kota Surabaya semakin membaik setiap tahun seiring gencarnya program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, khususnya penduduk miskin. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Peningkatan AMH penduduk miskin di Kota Surabaya selama tiga tahun terakhir tampak baik pada kelompok umur 15-24 tahun maupun kelompok umur 15-55 tahun. Pada tahun 2014, seluruh penduduk pada kelompok umur 15-24 tahun dapat membaca dan menulis atau AMH kelompok umur ini sebesar 100,00 persen. Pada tahun 2015 nilai AMH kelompok umur 15-24 tahun juga 100,00 persen, demikian juga dengan tahun 2016. Sementara itu, untuk AMH penduduk miskin usia 15-55 tahun sebagian besar sudah mencapai ang-

Tabel 7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Kota Surabaya, 2014-2016

Karakteristik Pendidikan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Melek Huruf			
a. 15 - 24 Tahun	100,00	100,00	100,00
b. 15 - 55 Tahun	96,41	100,00	98,93
2. Angka Partisipasi Sekolah			
a. 7 - 12 Tahun	100,00	100,00	100,00
b. 13 - 15 Tahun	100,00	91,08	100,00
3. Pendidikan yang Ditamatkan (15 +)			
a. Tidak Tamat SD	26,36	10,87	15,41
b. Tamat SD dan SLTP	43,45	56,93	58,98
c. Tamat SLTA ke atas	30,19	32,20	25,61

Sumber: BPS Republik Indonesia

umur 15-55 tahun selama periode 2014-2016 perkembangannya cukup fluktuatif. Pada 2014 nilai AMH kelompok umur 15-55 tahun sebesar 96,41 persen. Lalu pada tahun 2015 meningkat menjadi 100,00 persen. Namun pada tahun 2016 turun 1,07 poin menjadi 98,93 persen.

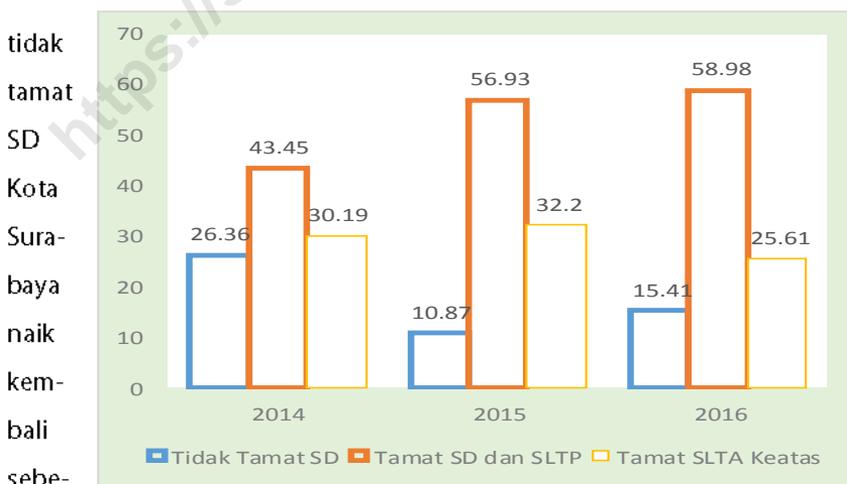
Kenaikan angka melek huruf pada penduduk miskin selama tiga tahun terakhir sejalan dengan kenaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Nilai APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Surabaya pada periode 2014 sampai 2016 cukup stabil. Pada tahun 2014, APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Surabaya sebesar 100,00 persen atau seluruhnya. Nilai APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Surabaya pada tahun 2015 juga 100,00 persen, demikian juga dengan tahun 2016. Sementara itu, APS penduduk miskin usia 13-15 tahun memiliki fluktuasi yang sedikit berbeda. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 100,00 persen atau seluruhnya, namun turun 8,92 poin menjadi 91,08 persen pada 2015.

ka 90 persen ke atas. Pada kelompok

Kemudian kembali naik 8,92 poin pada tahun 2016 menjadi sebesar 100,00 persen. APS penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun ini dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah.

Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2014 terdapat sekitar 43,45 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Surabaya yang tamat SD dan SLTP, kemudian meningkat menjadi 56,93 persen pada tahun 2015 dan 58,98 persen pada 2016. Sedangkan untuk penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA ke atas pada tahun 2014 mencapai 30,19 persen dan meningkat menjadi 32,2 persen pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 turun 6,59 persen menjadi 25,61 persen. Sementara itu, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD cukup fluktuatif persentasenya pada periode 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD Kota Surabaya sebesar 26,36 persen. Kemudian turun cukup signifikan sebesar 15,49 persen menjadi 10,87 persen. Namun nilai penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang

Gambar 7.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15+ Menurut Pendidikan yang Ditamatkan,



Sumber: BPS Kota Surabaya

sar 4,54 persen menjadi 15,41 persen

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga

Beberapa ahli menyatakan bahwa pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Persentase penduduk miskin Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tidak banyak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sebesar 33,96 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 43,29 persen, dan meningkat lagi 1,98 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 45,27 persen.

Penduduk miskin identik dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga berpengaruh pada pemilihan jenis pekerjaan. Sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal, dengan kecenderungan yang terus menurun selama 2014-2016. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 30,07 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Surabaya yang bekerja di sektor informal. Kemudian menurun menjadi 32,08 persen pada tahun 2015, dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 22,21 persen. Penurunan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal ini diikuti dengan semakin banyaknya penduduk miskin yang bekerja di sektor formal. Selama tahun 2014-2016 masing-masing sebesar 35,97 persen; 24,63 persen; dan 32,51 persen.

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih kecil dibanding penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan di Kota Surabaya sedikit lahan pertaniannya. Pada tahun 2014 sebanyak 2,56 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, dan jumlahnya relatif menurun pada tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 0,62 persen pada tahun

Tabel 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas di Kota Surabaya Menurut Status Bekerja dan Lapangan Pekerjaan, 2014-2016

Karakteristik Ketenagakerjaan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Status Bekerja			
Tidak Bekerja	33,96	43,29	45,27
Bekerja di Sektor Informal	30,07	32,08	22,21
Bekerja di Sektor Formal	35,97	24,63	32,51
2. Lapangan Pekerjaan			
Tidak Bekerja	33,96	43,29	45,27
Bekerja di Sektor Pertanian	2,56	2,55	0,62
Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	63,48	54,16	54,11

Sumber: BPS Republik Indonesia

2016. Sementara itu, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian pada tahun 2014 sebesar 63,48 persen, kemudian turun menjadi 54,16 persen pada tahun 2015 dan pada 2016 menjadi sebesar 54,11 persen.

7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga

Karakteristik perumahan merupakan karakteristik rumah tangga miskin yang tidak kalah penting untuk dibahas. BPS menggunakan delapan variabel perumahan untuk mendefinisikan rumah tangga miskin, yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, ketersediaan air bersih, jenis jamban, kepemilikan asset, pendapatan, pengeluaran, dan konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam).

Adanya keterbatasan untuk leluasa melakukan kegiatan di dalam rumah yang sempit menandakan kualitas hidup yang lebih rendah dibanding mereka yang lebih leluasa beraktivitas di dalam rumah (TNP2K, 2010).

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Karakteristik Perumahan, 2014-2016

Karakteristik Perumahan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Luas Lantai Perkapita Rumah Tangga Miskin			
< 8 m ²	59,94	71,17	
8 - 15 m ²	26,61	22,59	
> 15 m ²	13,44	6,28	
2. Penggunaan Air Bersih			
Rumah Tangga Miskin	10,00	100,00	96,28
Rumah Tangga Tidak Miskin	99,91	99,56	
3. Penggunaan Jamban Sendiri/Bersama			
Rumah Tangga Miskin	83,00	87,73	88,35
Rumah Tangga Tidak Miskin	97,15	97,90	

Sumber: BPS Republik Indonesia

Rumah tangga miskin cenderung memiliki luas lantai perkapita lebih kecil. Di Kota Surabaya rumah tangga miskin yang memiliki luas lantai perkapita di atas 15 m² sangat sedikit, yaitu 13,44 persen pada tahun 2014. Kemudian turun 7,16 persen menjadi 6,28 persen pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh harga property di Kota Surabaya relatif sangat mahal. Dalam Laporan Eksekutif Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 disebutkan bahwa rata-rata luas lantai perkapita penduduk di Kota Surabaya sebesar 27,51 m². Sementara itu, pada tahun 2014 lebih dari separuh atau sekitar 59,94 persen rumah tangga di Kota Surabaya menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang dari 8 m²; dan pada tahun 2015 persentasenya meningkat menjadi 71,17 persen.

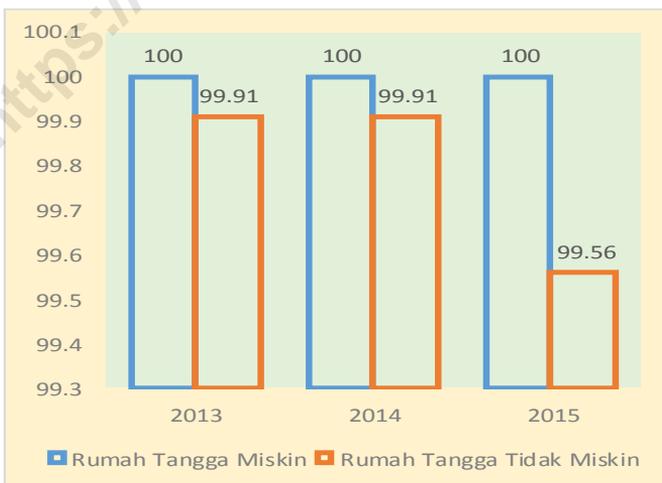
Pada tahun 2015 terdapat mayoritas rumah tangga miskin di Kota Surabaya yang memiliki luas lantai perkapita kurang dari 8 m² atau sebe-

sar 71,17 persen, 22,59 persen rumah tangga miskin dengan luas lantai perkapita antara 8-15 m²; serta 6,28 persen rumahtangga miskin yang luas lantai perkapitanya di atas 15 m².

Penggunaan air bersih berkaitan dengan kualitas hidup seseorang. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kebutuhan minum dan sanitasi. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010). Air bersih yang dicakup di sini adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, dan sumur/mata air terlindung.

Secara relatif, penggunaan air bersih pada rumah tangga tidak miskin lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin; dengan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya baik untuk rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Pada tahun 2014 semua rumah tangga miskin Kota Surabaya menggunakan air bersih atau sebesar 100,00 persen, demikian halnya dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 juga semua rumah tangga miskin Kota Surabaya

Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih, 2013-

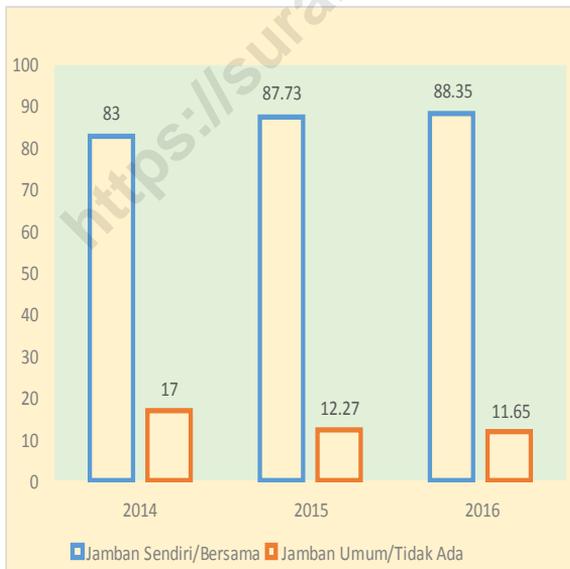


Sumber: BPS Kota Surabaya

menggunakan air bersih.

Karakteristik perumahan yang tidak kalah penting untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin adalah penggunaan jamban sendiri/bersama. Ketersediaan tempat buang air besar (jamban) di rumah tangga merupakan salah satu syarat hidup sehat. Sebagaimana penggunaan air bersih, penggunaan jamban sendiri/bersama pada rumah tangga miskin di Kota Surabaya relatif lebih kecil dibandingkan rumah tangga tidak miskin.

Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur Menurut Jenis Jamban, 2014-2016



Sumber: BPS Kota Surabaya

Selama periode 2014 sampai dengan 2016 persentase rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban sendiri/bersama semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban umum/tidak ada yang semakin turun. Pada tahun 2014 terdapat 83,00 persen rumah tangga miskin di Kota Surabaya yang menggunakan jamban sendiri/bersama. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 4,73 poin per-

sen menjadi 87,73 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 88,35 persen. Sedangkan rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban sebesar 17,00

persen. Kemudian pada tahun 2015 persentase rumah tangga miskin

<https://surabayakota.bps.go.id>



8. SOSIAL LAINNYA

8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan

Melakukan perjalanan adalah bagian kebutuhan dasar manusia. Perjalanan dilakukan selain untuk aktivitas pekerjaan, juga untuk mencukupi kebutuhan rohani. Penduduk Kota Surabaya selama enam bulan terakhir yang melakukan perjalanan sebesar 35,18 persen.

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Kota Surabaya yang Melakukan Perjalanan 2016



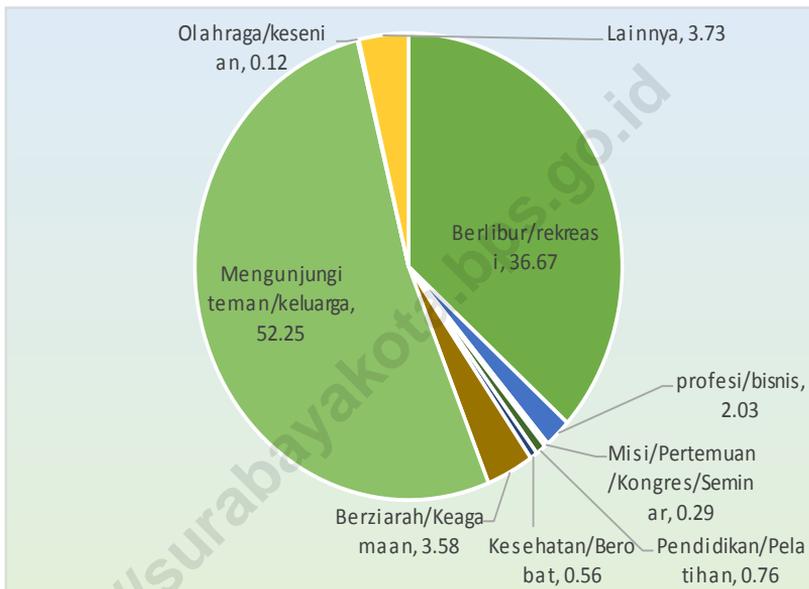
Sumber: BPS Kota Surabaya

Berbagai tujuan yang dilakukan penduduk Kota Surabaya untuk melakukan perjalanan. Tujuan perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Kota Surabaya sebagian besar digunakan untuk mengunjungi teman/keluarga (52,25 persen) dan berlibur/rekreasi (36,67 persen).

Penduduk Kota Surabaya mayoritas muslim mempunyai budaya pulang kampung pada hari raya Idul Fitri. *Peak season* penduduk yang melakukan perjalanan terjadi antara H-7 hingga H+7 hari raya. Perekonomian berjalan cukup cepat pada momen musiman itu di seluruh sektor ekonomi. Fenomena tersebut menjelaskan mengapa persentase penduduk yang melakukan perjalanan terbanyak dengan tujuan mengunjungi keluarga/teman.

Perjalanan terbanyak kedua dimanfaatkan untuk berlibur/rekreasi. Untuk menghilangkan kepenatan dalam mengerjakan rutinas sehari-hari, banyak orang memilih rekreasi. Di Kota Surabaya sendiri, terdapat banyak tempat hiburan untuk rekreasi seperti wisata alam pantai, monumen-monumen bersejarah, hutan konservasi, taman hiburan, dan tempat bermain. Sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik sangat mendukung semakin berkembangnya tempat-tempat rekreasi di Kota Surabaya.

Gambar 8.2 Persentase Tujuan Utama Penduduk Kota Surabaya Melakukan Perjalanan 2016



Sumber: BPS Kota Surabaya

Di antara tempat rekreasi terkenal di Jawa Timur, terdapat beberapa pesarehan yang dikramatkan berupa peninggalan Wali Songo yang sering digunakan sebagai tempat wisata religi. Lima dari sembilan penyebar agama islam di Jawa (Wali Songo) terdapat di Jawa Timur. Makam Sunan Ampel berada di Surabaya, makam Sunan Giri dan Syeikh Maulana Malik Ibrahim berada di Gresik, makam Sunan Derajat berada di Lamongan dan makam Sunan Bonang berada di Tuban. Selain itu, ada beberapa tempat keramat yang serupa tersebar di wilayah Madura. Pesarehan yang terkenal di Madura antara lain Syaichona Kholil dan air mata Ebu di Bangkalan, pesarehan Kyai Batu Ampar di Sampang, dan pesarehan Asta Tinggi di Sumenep.

Pada hari libur dan hari besar agama Islam tempat-tempat keramat tersebut banyak diziarahi baik penduduk Jawa Timur maupun yang berasal dari wilayah lainnya. Beberapa pondok pesantren di Jawa Timur juga mempunyai kebiasaan untuk melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari-hari tertentu.

Berdasarkan data Susenas 2016, penduduk Kota Surabaya sendiri yang melakukan perjalanan dalam rangka tujuan keagamaan atau ziarah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3,58 persen, merupakan tujuan perjalanan keempat terbanyak. Angka itu termasuk penduduk Jawa Timur yang melakukan ziarah di luar Jawa Timur. Sedangkan tujuan perjalanan terbanyak ketiga adalah lainnya, sebesar 3,73 persen. Selanjutnya perjalanan dengan tujuan profesi/bisnis sebesar 2,03 persen.

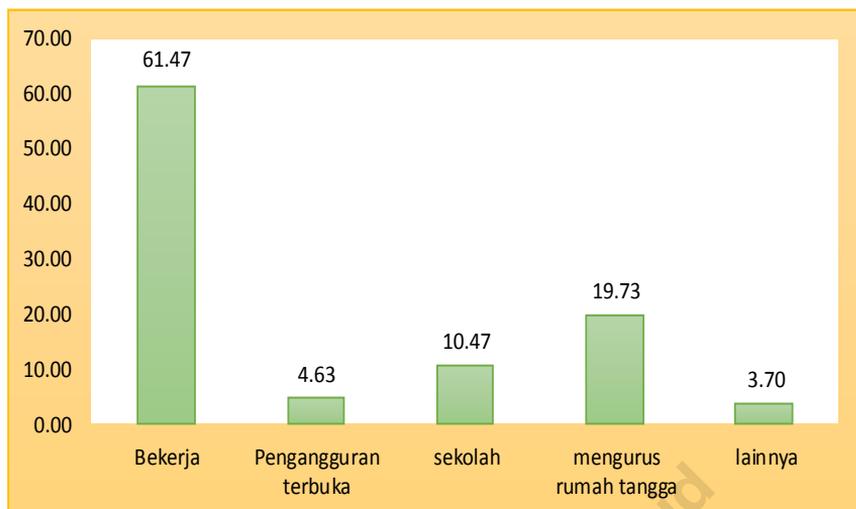
Tujuan utama lainnya seperti bepergian untuk misi/pertemuan/kongres/seminar, pendidikan/pelatihan, kesehatan/berobat, dan olahraga/kesenian kurang dari 1 persen, masing-masing sebesar 0,29 persen, 0,76 persen, 0,56 persen, dan 0,12 persen.

8.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu pendudu yang bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang kegiatan seminggu terakhir bekerja tercatat sebanyak 61,47 persen. Bekerja yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan bekerja minimal satu jam yang menghasilkan nilai ekonomis dalam seminggu terakhir baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Gambar 8.3 Persentase Penduduk Kota Surabaya Menurut Kegiatan 2016



Sumber: BPS Kota Surabaya

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja tercatat terbanyak dibanding kegiatan lainnya. Terbanyak kedua adalah penduduk yang mengurus rumah tangga atau sebesar 19,73 persen. Sebagian besar yang mengurus rumah tangga adalah ibu rumah tangga dan penduduk lansia (lanjut usia).

Distribusi penduduk ketiga yang terbesar adalah yang melakukan kegiatan sekolah. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah sebesar 10,47 persen. Bersekolah yang dimaksud adalah menjalani pendidikan setingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Sisanya adalah penduduk yang melakukan kegiatan lainnya, seperti penduduk yang tidak melakukan kegiatan apapun, punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 3,70 persen. Namun sebanyak 4,63 persen penduduk masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Pembagian kelompok penduduk tersebut berbeda menurut definisi ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada pembatasan usia penduduk. Jika dilihat menurut ketenagakerjaan, diukur dari penduduk yang bekerja dan melakukan aktivitas lainnya dengan usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan definisi ketenaga kerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang bekerja dan penganggur) sebesar 66,10 persen, sedangkan sisanya sebesar 33,90 persen melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

8.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi.

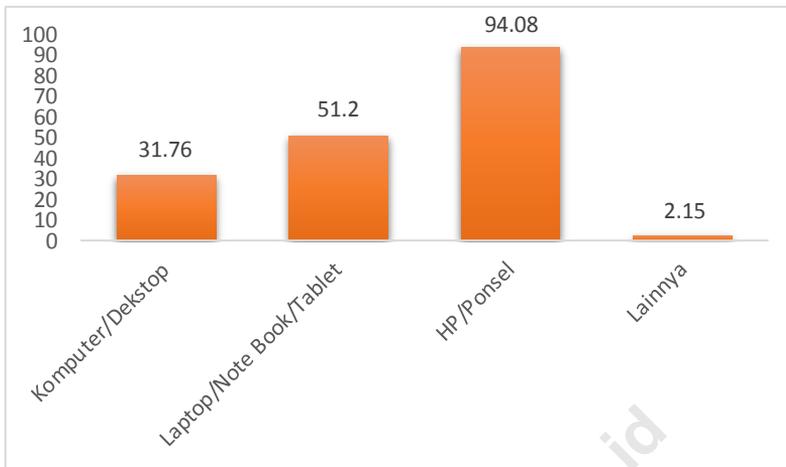
Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *hand phone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang anggotanya mempunyai HP yang mencapai lebih dari 90 persen, tepatnya 94,08 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Komunikasi selular, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat.

Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat BBM, facebook, whatsapp, Line dan lain sebagainya yang tidak kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Menguasai/Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Surabaya 2016



Sumber: BPS Kota Surabaya

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kota Surabaya.

Sementara, dari seluruh rumah tangga di Kota Surabaya, anggota rumah tangganya yang menguasai atau memiliki alat informasi berupa komputer atau dekstop tercatat sebesar 31,76 persen. Sedangkan rumah tangga yang anggota rumah tangganya menguasai atau memiliki alat informasi berupa laptop/note book/tablet sebesar 51,20 persen. Persentase pengguna laptop/note book/tablet lebih besar dibandingkan pengguna komputer/dekstop karena laptop lebih efisien dan dapat dibawa kemana-mana. Persentase ini diduga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

8.4. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

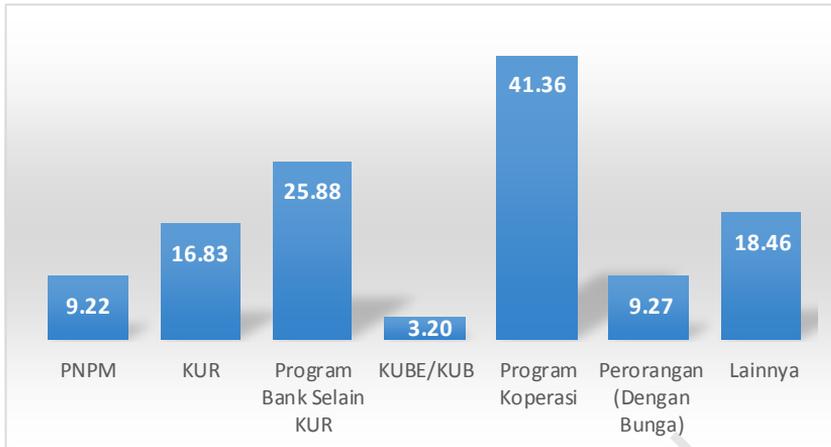
Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Dari total penerima kredit usaha di Kota Surabaya, terbanyak menggunakan jasa koperasi atau sebesar 41,36 persen. Selain menggunakan jasa koperasi, penerima kredit Kota Surabaya menggunakan fasilitas kredit dari Bank sebesar 25,88 persen. Pengguna KUR sebagai kredit usaha sebesar 16,83 persen. Sedangkan yang menggunakan kredit usaha perorangan (dengan bunga), PNPM, dan KUBE/KUB dibawah 10 persen, dengan rincian pengguna kredit usaha perorangan (dengan bunga) sebesar 9,27 persen, PNPM sebesar 9,22 persen, dan KUBE/KUB sebesar 3,20 persen.

Meskipun pada umumnya perusahaan pembiayaan di daerah sebagian besar adalah bank, koperasi tetap menjadi pilihan favorit masyarakat. Bagi m sebagian masyarakat, prosedur pengajuan kredit melalui bank dianggap cukup rumit sehingga ada rasa takut untuk memanfaatkan kredit usaha.

Kondisi itu berbeda dengan prosedur pengambilan kredit melalui koperasi yang dianggap lebih ringkas dan jangkauannya hingga ke pelosok daerah. Selain bisa memanfaatkan sebagai tempat pemberian kredit, melalui koperasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil produksi usaha.

Gambar 8.5 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Surabaya, 2016

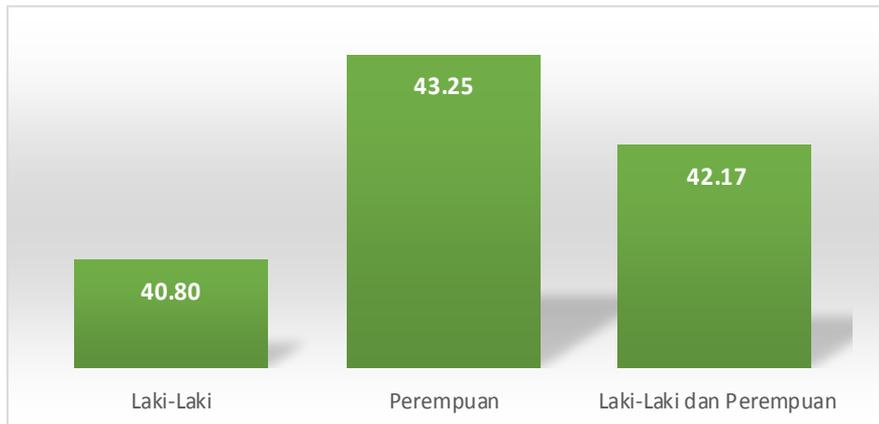


Sumber: BPS Kota Surabaya

Dua jenis kredit usaha yang sering digunakan penerima kredit usaha adalah KUR dan Perorangan (dengan bunga) masing-masing 16,83 persen dan 9,27 persen. Bagi wilayah yang tidak tersedia lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi. Persentase dibawah 10 persen menindikasikan masyarakat Kota Surabaya cukup mempertimbangkan resiko pinjam meminjam antar perorangan.

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kota Surabaya yang menggunakan jaminan kesehatan. Dari seluruh penduduk Kota Surabaya yang berobat dan yang menggunakan jaminan kesehatan tercatat sebanyak 42,17 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pengguna jaminan kesehatan terdiri 40,80 persen penduduk laki-laki dan 43,25 persen penduduk perempuan.

Gambar 8.6 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Surabaya, 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

Melihat data tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesadaran perempuan akan pentingnya jaminan kesehatan lebih tinggi dari pada laki-laki. Angka tersebut sangat berkorelasi dengan angka harapan hidup laki-laki yang selalu lebih rendah dibanding perempuan.

Dari total seluruh penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis, terbanyak menggunakan BPJS Kesehatan sebesar 16,63 persen, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 11,27 persen dan pengguna Jamkesmas/PBI sebesar 10,76 persen.

Pengguna program kesehatan yang berasal dari dana APBD kabupaten/kota atau Jamkesda tercatat hanya sebesar 0,94 persen, sedangkan pengguna Asuransi Swasta sebesar 3,84 persen dan pengguna jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor sebesar 1,46 persen.

Jaminan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal.

Gambar 8.7 Persentase Penduduk Kota Surabaya Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Layanan Jaminan Kesehatan 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

Di Kota Surabaya sendiri, untuk meringankan biaya berobat bagi warga miskin selain dari program layanan kesehatan yang berasal dari pemerintah dan swasta, juga terdapat lembaga sosial lainnya yang turut menyediakan pembiayaan kesehatan gratis. Lembaga sosial tersebut bisa dalam bentuk LSM, aktivitas layanan orsos/orpol, maupun yang disediakan oleh lembaga keagamaan.

8.5. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan

Kenyamanan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan.

Pada tahun 2016 tercatat penduduk Kota Surabaya yang mengalami tindak kejahatan kurang dari 1 persen. Kejahatan yang dimaksud meliputi pencurian, penganiayaan, perampokan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

Gambar 8.8 Persentase Penduduk Jawa Timur yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan 2015

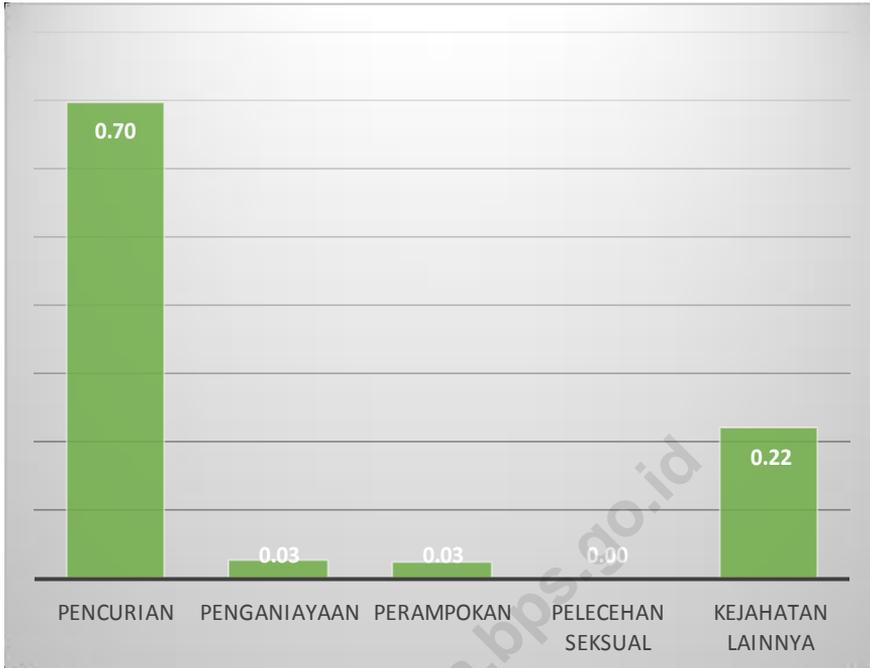


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Korban kejahatan terbanyak tercatat pada kejahatan pencurian sebesar 0,70 persen terutama curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Meskipun di Kota Surabaya pengamanannya sudah cukup baik, minimal rumah dan pagar mereka dikunci untuk menjaga harta benda di dalam rumah.

Korban pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,03 persen. Korban penganiayaan juga tercatat sama sebesar 0,03 persen, sedangkan korban pelecehan seksual 0,00 persen atau dengan kata lain tidak terdapat korban pelecehan seksual. Korban kejahatan lainnya di Kota Surabaya sebesar 0,22 persen. Optimalisasi kerjasama antara masyarakat, Pemerintah dan Kepolisian sangat diharapkan agar kasus kejahatan di Kota Surabaya bisa ditekan sekecil mungkin.

Gambar 8.9. Persentase Penduduk Kota Surabaya yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan 2015



Sumber: BPS Kota Surabaya

LAMPIRAN

<https://surabaya.go.id>

I

(1) Indikator Kependudukan

Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan, 2013-2017

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
010 Karang Pilang	71.898	71.541	71.247	70.928	70.568
020 Jambangan	48.312	48.821	49.377	49.923	50.442
030 Gayungan	43.126	43.154	43.220	43.268	43.291
040 wonocolo	81.031	81.080	81.200	81.289	81.328
050 Tenggilis Mejoyo	73.146	73.190	73.298	73.379	73.415
060 Gunung Anyar	65.189	66.057	66.994	67.919	68.814
070 Rungkut	122.789	123.049	123.414	123.735	123.981
080 Sukolilo	125.169	126.629	128.218	129.778	131.276
090 Mulyorejo	96.677	97.080	97.568	98.022	98.417
100 Gubeng	129.339	129.418	129.608	129.749	129.812
110 Wonokromo	132.174	131.519	130.981	130.395	129.733
120 Dukuh Pakis	65.780	66.123	66.525	66.905	67.247
130 Wiyung	71.937	73.089	74.324	75.550	76.750
140 Lakarsantri	54.990	56.144	57.372	58.604	59.825
141 Sambikerep	65.629	67.007	68.471	69.941	71.401
150 Tandes	104.972	105.336	105.794	106.214	106.57
160 Suko Manunggal	102.462	102.820	103.268	103.679	104.028
170 Sawahan	173.745	174.352	175.111	175.808	176.400
180 Tegalsari	84.939	84.518	84.172	83.796	83.371
190 Genteng	47.406	47.572	47.778	47.969	48.130
200 Tambaksari	207.464	207.83	208.377	208.842	209.186
210 Kenjeran	172.924	175.692	178.660	181.611	184.495
211 Bulak	38.094	38.291	38.523	38.742	38.938
220 Simokerto	78.701	78.311	77.990	77.641	77.247
230 Semampir	150.242	149.497	148.885	148.221	147.468
240 Pabean Cantian	68.879	68.538	68.257	67.952	67.607
250 Bubutan	87.258	87.972	88.765	89.535	90.254
260 Krembangan	107.666	107.732	107.890	108.009	108.062
270 Asem Rowo	44.118	44.479	44.883	45.273	45.638
280 Benowo	58.144	59.365	60.662	61.965	63.257
281 Pakal	47.729	47.718	47.751	47.764	47.748
Kota Surabaya	2.821.929	2.833.924	2.848.583	2.862.406	2.874.699

Sumber: BPS Kota Surabaya

I

(2) Indikator Kependudukan

Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, 2013-2017

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)			
	2013-2014	2014-2015	2015-2015	2016-2017
010 Karang Pilang	-0,50	-0,41	-0,45	-0,51
020 Jambangan	1,05	1,14	1,11	1,04
030 Gayungan	0,06	0,15	0,11	0,05
040 Wonocolo	0,06	0,15	0,11	0,05
050 Tenggilis Mejoyo	0,06	0,15	0,11	0,05
060 Gunung Anyar	1,33	1,42	1,38	1,32
070 Rungkut	0,21	0,30	0,26	0,20
080 Sukolilo	1,17	1,25	1,22	1,15
090 Mulyorejo	0,42	0,50	0,47	0,40
100 Gubeng	0,06	0,15	0,11	0,05
110 Wonokromo	-0,50	-0,41	-0,45	-0,51
120 Dukuh Pakis	0,52	0,61	0,57	0,51
130 Wiyung	1,60	1,69	1,65	1,59
140 Lakarsantri	2,10	2,19	2,15	2,08
141 Sambikerep	2,10	2,18	2,15	2,09
150 Tandes	0,35	0,43	0,40	0,34
160 Suko Manunggal	0,35	0,44	0,40	0,34
170 Sawahan	0,35	0,44	0,40	0,34
180 Tegalsari	-0,50	-0,41	-0,45	-0,51
190 Genteng	0,35	0,43	0,40	0,34
200 Tambaksari	0,18	0,26	0,22	0,16
210 Kenjeran	1,60	1,69	1,65	1,59
211 Bulak	0,52	0,61	0,57	0,51
220 Simokerto	-0,50	-0,41	-0,45	-0,51
230 Semampir	-0,50	-0,41	-0,45	-0,51
240 Pabean Cantian	-0,50	-0,41	-0,45	-0,51
250 Bubutan	0,82	0,90	0,87	0,80
260 Krembangan	0,06	0,15	0,11	0,05
270 Asem Rowo	0,82	0,91	0,87	0,81
280 Benowo	2,10	2,18	2,15	2,09
281 Pakal	-0,02	0,07	0,03	-0,03
Kota Surabaya	0,43	0,52	0,49	0,43

Sumber: BPS Kota Surabaya

I

(3) Indikator Kependudukan

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan, 2013-2017

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
	2013	2014	2015	2016	2017
010 Karang Pilang	103,00	102,94	102,96	103,03	103,04
020 Jambangan	99,58	99,52	99,54	99,61	99,63
030 Gayungan	91,18	91,13	91,15	91,21	91,21
040 wonocolo	96,94	96,88	96,91	96,97	96,98
050 Tenggilis Mejoyo	102,50	102,44	102,46	102,53	102,55
060 Gunung Anyar	99,98	99,93	99,95	100,02	100,03
070 Rungkut	96,22	96,17	96,19	96,25	96,26
080 Sukolilo	99,48	99,43	99,45	99,52	99,53
090 Mulyorejo	90,34	90,29	90,31	90,37	90,38
100 Gubeng	90,91	90,86	90,88	90,94	90,95
110 Wonokromo	94,55	94,50	94,52	94,58	94,60
120 Dukuh Pakis	94,65	94,60	94,61	94,68	94,69
130 Wiyung	94,97	94,91	94,93	95,00	95,01
140 Lakarsantri	93,99	93,93	93,95	94,01	94,03
141 Sambikerep	97,27	97,22	97,24	97,31	97,31
150 Tandes	100,99	100,93	100,95	101,03	101,04
160 Suko Manunggal	97,59	97,53	97,55	97,62	97,63
170 Sawahan	96,08	96,02	96,04	96,11	96,12
180 Tegalsari	95,87	95,81	95,83	95,90	95,91
190 Genteng	94,18	94,12	94,15	94,21	94,22
200 Tambaksari	97,69	97,63	97,65	97,72	97,73
210 Kenjeran	101,95	101,89	101,91	101,98	101,99
211 Bulak	101,36	101,30	101,33	101,40	101,41
220 Simokerto	95,81	95,75	95,77	95,84	95,85
230 Semampir	101,88	101,82	101,84	101,91	101,92
240 Pabean Cantian	101,11	101,05	101,07	101,14	101,15
250 Bubutan	96,92	96,86	96,88	96,95	96,96
260 Krembangan	98,65	98,60	98,62	98,69	98,70
270 Asem Rowo	104,16	104,10	104,12	104,20	104,21
280 Benowo	97,98	97,92	97,94	98,01	98,02
281 Pakal	101,36	101,31	101,33	101,40	101,41
Kota Surabaya	97,59	97,54	97,56	97,63	97,64

Sumber: BPS Kota Surabaya

I

(4) Indikator Kependudukan

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2012 –2016

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2013	2014	2015	2016	2017
010 Karang Pilang	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
020 Jambangan	7.790	7.751	7.719	7.685	7.646
030 Gayungan	11.530	11.652	11.784	11.915	12.039
040 wonocolo	7.105	7.109	7.120	7.128	7.132
050 Tenggilis Mejoyo	11.969	11.976	11.994	12.007	12.013
060 Gunung Anyar	13.251	13.259	13.279	13.293	13.300
070 Rungkut	6.714	6.803	6.899	6.995	7.087
080 Sukolilo	5.825	5.837	5.855	5.870	5.881
090 Mulyorejo	5.286	5.348	5.415	5.480	5.544
100 Gubeng	6.803	6.832	6.866	6.898	6.926
110 Wonokromo	16.188	16.197	16.221	16.239	16.247
120 Dukuh Pakis	15.605	15.528	15.464	15.395	15.317
130 Wiyung	6.618	6.652	6.693	6.731	6.765
140 Lakarsantri	5.773	5.866	5.965	6.063	6.160
141 Sambikerep	2.896	2.957	3.021	3.086	3.150
150 Tandes	2.771	2.830	2.892	2.954	3.015
160 Suko Manunggal	9.483	9.515	9.557	9.595	9.627
170 Sawahan	11.101	11.140	11.188	11.233	11.271
180 Tegalsari	25.071	25.159	25.269	25.369	25.455
190 Genteng	19.799	19.701	19.621	19.533	19.434
200 Tambaksari	11.705	11.746	11.797	11.844	11.884
210 Kenjeran	23.077	23.118	23.179	23.23	23.269
211 Bulak	22.255	22.612	22.994	23.373	23.745
220 Simokerto	5.669	5.698	5.733	5.765	5.794
230 Semampir	30.386	30.236	30.112	29.977	29.825
240 Pabean Cantian	17.151	17.066	16.996	16.920	16.834
250 Bubutan	10.129	10.079	10.038	9.993	9.942
260 Krembangan	22.606	22.791	22.996	23.196	23.382
270 Asem Rowo	12.910	12.918	12.936	12.951	12.957
280 Benowo	2.857	2.881	2.907	2.932	2.956
281 Pakal	2.450	2.502	2.556	2.611	2.666
Kota Surabaya	8.635	8.671	8.716	8.759	8.796

Sumber: BPS Kota Surabaya

II

(2) Indikator Kependudukan

Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota, 2012–2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	70,61	70,70	70,75	71,05	71,18
2 Ponorogo	71,78	71,85	71,88	72,08	72,18
3 Trenggalek	72,44	72,49	72,51	72,91	73,03
4 Tulungagung	72,82	72,86	72,88	73,28	73,40
5 Blitar	72,42	72,47	72,50	72,80	72,89
6 Kediri	71,97	72,02	72,04	72,14	72,20
7 Malang	71,72	71,76	71,78	71,98	72,05
8 Lumajang	68,92	69,02	69,07	69,27	69,38
9 Jember	67,65	67,75	67,80	68,20	68,37
10 Banyuwangi	69,79	69,88	69,93	70,03	70,11
11 Bondowoso	65,22	65,36	65,43	65,73	65,89
12 Situbondo	67,93	68,03	68,08	68,28	68,41
13 Probolinggo	65,58	65,69	65,75	66,15	66,31
14 Pasuruan	69,75	69,80	69,83	69,83	69,86
15 Sidoarjo	73,43	73,43	73,43	73,63	73,67
16 Mojokerto	71,72	71,75	71,76	71,96	72,03
17 Jombang	71,28	71,34	71,37	71,67	71,77
18 Nganjuk	70,76	70,83	70,87	70,97	71,04
19 Madiun	69,59	69,70	69,76	70,36	70,55
20 Magetan	71,79	71,87	71,91	72,01	72,09
21 Ngawi	71,19	71,28	71,33	71,53	71,63
22 Bojonegoro	69,98	70,07	70,11	70,51	70,67
23 Tuban	70,15	70,22	70,25	70,55	70,67
24 Lamongan	71,35	71,43	71,47	71,67	71,77
25 Gresik	72,18	72,19	72,20	72,30	72,33
26 Bangkalan	69,56	69,60	69,62	69,72	69,77
27 Sampang	67,43	67,46	67,48	67,58	67,62
28 Pamekasan	66,48	66,53	66,56	66,86	66,95
29 Sumenep	69,90	69,98	70,02	70,42	70,56
Kota					
71 Kediri	73,49	73,51	73,52	73,62	73,65
72 Blitar	72,66	72,69	72,70	73,00	73,09
73 Malang	72,25	72,28	72,30	72,60	72,68
74 Probolinggo	69,46	69,50	69,52	69,72	69,79
75 Pasuruan	70,48	70,52	70,54	70,84	70,93
76 Mojokerto	72,33	72,37	72,39	72,69	72,78
77 Madiun	72,33	72,38	72,41	72,41	72,44
78 Surabaya	73,80	73,83	73,85	73,85	73,87
79 Batu	72,02	72,05	72,06	72,16	72,20
Jawa Timur	70,14	70,34	70,45	70,68	70,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II

(3) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2014-2015

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan (%)		Rata-rata lama sakit (Hari)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1 Pacitan	21,90	59,64	5,75	5,88
2 Ponorogo	19,26	49,00	5,98	5,27
3 Trenggalek	17,70	47,63	7,08	6,75
4 Tulungagung	19,84	56,04	5,79	5,86
5 Blitar	18,18	41,95	6,19	6,57
6 Kediri	19,02	43,49	6,05	6,22
7 Malang	18,40	63,26	7,07	6,17
8 Lumajang	14,30	66,70	5,81	6,38
9 Jember	19,53	46,76	5,52	6,05
10 Banyuwangi	20,62	45,33	6,10	6,76
11 Bondowoso	27,72	58,51	6,56	6,67
12 Situbondo	18,62	60,88	6,14	6,04
13 Probolinggo	16,84	71,97	6,28	5,94
14 Pasuruan	22,43	54,98	5,81	6,24
15 Sidoarjo	14,98	48,44	4,84	4,79
16 Mojokerto	22,18	54,08	5,29	5,67
17 Jombang	21,94	49,95	5,73	5,62
18 Nganjuk	17,81	55,76	6,07	5,99
19 Madiun	14,73	51,27	6,41	6,73
20 Magetan	16,22	45,92	5,93	6,05
21 Ngawi	16,41	48,96	6,74	6,69
22 Bojonegoro	15,78	50,44	5,40	6,15
23 Tuban	21,27	50,32	5,69	6,20
24 Lamongan	18,00	52,84	6,60	6,25
25 Gresik	13,21	38,96	4,64	5,68
26 Bangkalan	16,45	54,73	5,46	5,16
27 Sampang	24,91	63,23	6,40	4,64
28 Pamekasan	20,50	49,46	6,31	6,23
29 Sumenep	19,50	60,35	5,63	5,18
Kota				
71 Kediri	21,50	48,17	6,08	5,68
72 Blitar	23,14	48,09	5,39	5,38
73 Malang	20,92	50,71	5,72	4,63
74 Probolinggo	21,19	70,03	4,96	5,31
75 Pasuruan	17,89	43,61	5,83	5,87
76 Mojokerto	15,77	35,45	4,71	5,69
77 Madiun	15,70	47,20	5,52	5,63
78 Surabaya	17,56	43,14	4,31	5,57
79 Batu	20,90	58,56	6,07	4,97
Jawa Timur	18,79	51,63	5,83	5,83

Sumber: BPS provinsi Jawa Timur

II

(4) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Anak Usia 0-23 Bulan Yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Pemberian ASI Pada Bayi Usia 0-23 Bulan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Anak Us ia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI (%)		Rata-rata Lamanya Pemberian ASI pada Bayi Us ia 0-23 bulan (bulan)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Kabupaten				
1 Pacitan	100,00	94,07	10,87	11,95
2 Ponorogo	93,69	92,20	11,16	9,86
3 Trenggalek	100,00	98,93	10,56	10,38
4 Tulungagung	92,30	94,48	9,45	9,82
5 Blitar	94,02	94,13	9,36	10,91
6 Kediri	91,52	91,29	12,83	9,77
7 Malang	91,90	97,29	11,24	9,75
8 Lumajang	96,93	97,24	10,38	10,34
9 Jember	98,78	98,66	11,15	10,36
10 Banyuwangi	94,61	82,65	10,98	13,00
11 Bondowoso	98,26	92,69	10,91	10,10
12 Situbondo	95,53	84,01	11,81	10,59
13 Probolinggo	85,35	96,24	9,13	9,08
14 Pasuruan	90,12	97,18	11,08	10,38
15 Sidoarjo	92,01	93,88	8,90	10,03
16 Mojokerto	88,23	87,91	10,27	11,04
17 Jombang	95,94	97,91	10,71	11,12
18 Nganjuk	95,36	97,63	8,72	12,00
19 Madiun	97,28	94,15	9,48	9,05
20 Magetan	97,49	94,85	11,01	11,63
21 Ngawi	90,64	91,49	10,69	9,68
22 Bojonegoro	96,62	97,97	10,58	10,41
23 Tuban	90,41	93,32	11,13	9,43
24 Lamongan	95,97	100,00	10,07	9,87
25 Gresik	95,32	96,69	8,98	9,71
26 Bangkalan	97,80	93,55	10,62	9,66
27 Sampang	95,35	97,10	9,44	8,66
28 Pamekasan	95,30	96,56	10,55	8,41
29 Sumenep	98,37	98,16	9,82	11,34
Kota				
71 Kediri	92,07	95,54	8,73	8,64
72 Blitar	91,55	94,06	9,17	9,61
73 Malang	96,70	93,05	8,50	10,01
74 Probolinggo	83,36	91,38	8,66	10,22
75 Pasuruan	95,66	94,80	9,85	8,71
76 Mojokerto	91,62	91,55	7,35	7,01
77 Madiun	95,46	92,19	9,94	7,08
78 Surabaya	93,23	87,19	9,17	10,45
79 Batu	95,13	90,00	9,19	8,97
Jawa Timur	94,07	94,35	10,25	10,17

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II

(5) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Bayi Usia 12-59 bulan di Jawa Timur yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2015

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	94,71	98,53	100,00	86,93	98,72
2 Ponorogo	96,82	98,72	98,79	79,50	98,09
3 Trenggalek	95,57	94,99	98,16	78,95	93,96
4 Tulungagung	96,94	95,74	98,85	81,27	95,00
5 Blitar	96,36	100,00	100,00	78,51	99,24
6 Kediri	94,74	98,16	98,89	79,08	97,06
7 Malang	95,41	99,16	99,17	82,53	98,09
8 Lumajang	95,20	97,06	100,00	68,23	91,71
9 Jember	94,27	97,87	98,59	78,36	95,59
10 Banyuwangi	92,26	99,19	99,37	78,15	95,92
11 Bondowoso	89,47	96,60	100,00	74,15	94,38
12 Situbondo	89,46	98,37	98,26	76,60	91,69
13 Probolinggo	87,80	99,54	98,45	62,02	100,00
14 Pasuruan	88,35	94,50	99,57	66,08	91,88
15 Sidoarjo	97,15	98,27	100,00	78,62	98,43
16 Mojokerto	93,99	99,25	100,00	77,40	99,25
17 Jombang	94,87	98,46	98,34	81,47	98,13
18 Nganjuk	95,46	96,99	97,72	79,78	95,90
19 Madiun	97,46	97,70	97,77	78,28	96,40
20 Magetan	97,69	100,00	100,00	82,74	100,00
21 Ngawi	98,26	98,70	100,00	84,03	95,96
22 Bojonegoro	93,94	93,30	99,11	73,39	94,35
23 Tuban	94,36	97,70	100,00	77,73	95,97
24 Lamongan	93,83	95,83	99,20	75,63	95,26
25 Gresik	95,51	99,34	99,25	79,10	98,82
26 Bangkalan	62,32	91,47	98,12	46,44	92,41
27 Sampang	66,90	91,67	97,40	40,06	88,24
28 Pamekasan	74,45	86,35	97,11	53,72	79,95
29 Sumenep	85,85	97,97	98,61	67,75	94,85
Kota					
71 Kediri	93,64	99,46	99,47	79,53	99,46
72 Blitar	92,98	97,97	97,21	77,64	95,46
73 Malang	96,08	98,93	100,00	76,15	97,48
74 Probolinggo	91,80	99,28	99,30	73,40	96,70
75 Pasuruan	92,58	97,76	98,51	77,70	97,26
76 Mojokerto	96,86	100,00	100,00	78,02	100,00
77 Madiun	100,00	100,00	100,00	83,76	100,00
78 Surabaya	92,77	99,36	100,00	76,11	97,59
79 Batu	92,07	100,00	100,00	76,81	100,00
Jawa Timur	92,10	97,61	99,17	74,79	96,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

(6) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Bayi Usia 12-59 bulan di Jawa Timur yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2016

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	98,66	93,63	98,32	87,76	95,15
2 Ponorogo	96,41	92,18	97,12	78,96	91,81
3 Trenggalek	99,05	92,31	97,17	85,31	96,11
4 Tulungagung	96,14	92,51	97,74	81,67	71,75
5 Blitar	97,70	93,68	96,72	86,67	96,36
6 Kediri	95,46	92,76	94,15	83,42	93,54
7 Malang	94,88	90,16	91,75	77,18	92,25
8 Lumajang	94,18	88,31	92,94	77,12	89,33
9 Jember	92,10	86,25	91,92	73,76	83,89
10 Banyuwangi	90,37	84,71	86,66	78,95	81,46
11 Bondowoso	90,62	85,34	92,86	75,53	81,21
12 Situbondo	95,84	87,17	94,55	81,23	83,90
13 Probolinggo	84,42	80,16	86,33	64,72	82,12
14 Pasuruan	91,09	84,52	92,18	74,16	88,57
15 Sidoarjo	97,46	93,87	96,80	78,11	93,00
16 Mojokerto	96,96	96,58	99,37	86,39	98,84
17 Jombang	96,85	94,17	97,31	84,53	97,45
18 Nganjuk	96,00	91,52	96,10	84,68	91,05
19 Madiun	97,37	95,74	98,56	86,86	97,71
20 Magetan	97,29	96,25	96,25	82,92	97,89
21 Ngawi	95,53	95,53	95,53	79,45	95,58
22 Bojonegoro	95,41	91,61	97,67	83,42	93,48
23 Tuban	94,76	86,49	94,18	72,09	89,67
24 Lamongan	91,26	84,69	88,32	73,85	89,14
25 Gresik	92,46	87,36	90,89	72,21	90,74
26 Bangkalan	54,19	46,13	55,43	31,46	39,00
27 Sampang	65,84	57,36	70,66	45,09	58,28
28 Pamekasan	78,13	64,83	79,21	54,91	65,36
29 Sumenep	95,12	67,50	81,63	57,30	60,32
Kota					
71 Kediri	95,20	83,25	90,95	74,21	91,24
72 Blitar	96,46	92,29	95,55	74,65	94,67
73 Malang	96,83	95,93	97,80	74,43	96,73
74 Probolinggo	96,72	92,78	94,91	71,39	96,41
75 Pasuruan	91,50	90,12	92,26	78,14	88,83
76 Mojokerto	97,89	97,42	98,91	71,37	99,38
77 Madiun	95,86	92,49	97,24	77,64	97,61
78 Surabaya	91,91	87,67	93,50	73,69	87,08
79 Batu	93,32	88,94	91,79	65,59	90,76
Jawa Timur	91,66	86,72	91,73	74,90	87,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II

(7) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Wanita Usia 15-49 tahun Menurut Penolong Persalinan dan Menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan	Dokter	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten							
1 Pacitan	16,20	7,50	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ponorogo	33,21	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trenggalek	37,51	1,40	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Tulungagung	19,43	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Blitar	29,44	2,61	65,34	2,61	0,00	0,00	0,00
6 Kediri	31,02	1,39	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Malang	29,93	2,56	66,23	0,00	0,00	1,28	0,00
8 Lumajang	22,60	1,31	71,72	0,00	0,00	4,36	0,00
9 Jember	10,98	1,04	79,28	0,00	0,00	8,70	0,00
10 Banyuwangi	29,49	3,57	60,16	2,12	0,00	4,66	0,00
11 Bondowoso	11,90	0,00	76,43	0,00	0,00	11,67	0,00
12 Situbondo	17,39	1,62	76,00	0,00	0,00	5,00	1,11
13 Probolinggo	20,82	2,60	67,26	2,35	0,00	5,87	0,00
14 Pasuruan	21,17	1,77	74,17	1,06	0,00	1,83	0,00
15 Sidoarjo	36,62	2,21	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Mojokerto	38,08	0,00	59,14	1,62	0,00	1,17	0,00
17 Jombang	22,70	1,17	72,38	2,84	0,00	0,92	0,00
18 Nganjuk	23,89	2,92	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Madiun	24,83	3,14	68,93	3,10	0,00	0,00	0,00
20 Magetan	28,45	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Ngawi	25,50	1,89	71,68	0,93	0,00	0,00	0,00
22 Bojonegoro	22,16	2,59	73,90	0,00	0,00	1,36	0,00
23 Tuban	20,42	3,32	73,23	1,79	0,00	1,24	0,00
24 Lamongan	41,53	2,81	52,04	3,63	0,00	0,00	0,00
25 Gresik	44,88	2,82	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Bangkalan	2,95	5,76	68,93	0,00	0,00	22,36	0,00
27 Sampang	9,58	1,77	57,15	0,00	0,63	30,87	0,00
28 Pamekasan	13,79	0,00	70,57	0,00	1,21	14,43	0,00
29 Sumenep	6,16	0,00	79,24	1,43	0,00	13,17	0,00
Kota							
71 Kediri	35,21	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Blitar	37,38	0,00	58,90	1,77	0,00	1,95	0,00
73 Malang	56,86	3,70	38,37	0,00	0,00	0,00	1,07
74 Probolinggo	39,34	2,29	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Pasuruan	34,44	0,00	64,76	0,00	0,00	0,80	0,00
76 Mojokerto	47,85	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Madiun	47,33	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Surabaya	58,41	0,00	40,29	0,00	0,00	1,31	0,00
79 Batu	35,42	1,97	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	28,85	1,76	64,94	0,67	0,05	3,67	0,05

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II

(8) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Wanita Usia 15-49 tahun Menurut Penolong Persalinan dan Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan	Dokter	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun Tradisional	Lainnya
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten							
1 Pacitan	38,30	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ponorogo	35,89	3,24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trenggalek	30,03	2,02	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Tulungagung	24,69	5,96	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Blitar	32,11	3,71	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kediri	40,75	3,59	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Malang	30,32	0,68	66,52	0,00	0,00	2,48	0,00
8 Lumajang	23,23	2,26	73,02	0,00	0,00	1,49	0,00
9 Jember	15,33	3,54	76,11	0,00	0,00	2,73	2,29
10 Banyuwangi	16,91	2,36	78,13	0,00	0,00	2,60	0,00
11 Bondowoso	13,36	0,00	80,59	0,00	0,00	6,05	0,00
12 Situbondo	18,29	3,04	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Probolinggo	12,78	0,90	79,26	0,00	0,00	7,05	0,00
14 Pasuruan	21,80	5,44	68,53	0,00	0,00	4,23	0,00
15 Sidoarjo	47,64	1,61	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Mojokerto	27,17	4,84	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Jombang	33,44	4,36	61,10	1,11	0,00	0,00	0,00
18 Nganjuk	21,63	0,96	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Madiun	29,22	3,66	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Magetan	44,54	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Ngawi	22,00	5,46	70,08	2,46	0,00	0,00	0,00
22 Bojonegoro	30,09	0,00	69,02	0,00	0,00	0,89	0,00
23 Tuban	21,62	0,85	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Lamongan	49,94	0,00	49,11	0,94	0,00	0,00	0,00
25 Gresik	35,78	4,77	57,03	0,00	0,00	2,41	0,00
26 Bangkalan	6,57	1,06	72,20	3,78	0,00	15,48	0,91
27 Sampang	20,22	0,00	66,46	0,00	0,00	13,32	0,00
28 Pamekasan	14,09	2,55	66,88	0,00	0,00	16,47	0,00
29 Sumenep	22,82	2,26	53,70	0,00	0,00	21,23	0,00
Kota							
71 Kediri	47,28	2,56	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Blitar	25,70	1,06	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Malang	54,88	0,00	42,33	0,00	0,00	2,78	0,00
74 Probolinggo	29,58	0,00	66,27	4,15	0,00	0,00	0,00
75 Pasuruan	23,00	3,39	71,06	0,00	0,00	2,55	0,00
76 Mojokerto	63,16	1,75	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Madiun	38,21	0,00	52,78	9,01	0,00	0,00	0,00
78 Surabaya	40,50	2,26	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Batu	49,45	0,00	46,19	4,35	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	29,17	2,33	65,22	0,28	0,04	2,79	0,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II

(9) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM	Praktek Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten								
Pacitan	6,56	1,85	56,03	7,15	24,73	4,02	1,63	4,18
Ponorogo	3,28	3,75	57,97	3,00	23,17	9,55	2,35	1,67
Trenggalek	4,70	2,67	62,43	5,56	21,47	1,75	1,59	3,10
Tulungagung	5,82	9,48	48,79	6,59	23,20	7,28	1,46	1,99
Blitar	5,19	5,91	67,70	6,07	17,05	0,39	2,12	4,09
Kediri	3,36	7,01	58,75	9,61	19,16	2,34	2,14	1,75
Malang	3,92	7,46	51,77	9,22	19,07	7,43	1,26	2,54
Lumajang	2,82	3,33	62,26	4,75	24,01	1,17	1,48	3,06
Jember	3,87	2,81	64,17	6,68	17,81	1,71	3,07	4,68
Banyuwangi	2,18	5,30	69,21	6,29	19,57	1,32	2,56	0,47
Bondowoso	1,61	1,44	75,98	3,15	16,28	2,56	1,56	0,68
Situbondo	5,12	2,18	52,41	5,38	29,46	1,99	3,34	1,62
Probolinggo	4,37	1,23	65,21	3,63	18,04	3,92	2,47	4,05
Pasuruan	3,30	1,83	50,50	8,54	28,09	4,51	2,11	6,88
Sidoarjo	10,00	9,16	35,67	20,63	24,85	1,58	0,93	0,98
Mojokerto	5,57	4,41	63,66	7,34	17,96	1,52	1,67	0,37
Jombang	4,26	7,13	49,69	6,49	26,49	3,31	0,74	6,44
Nganjuk	5,67	2,10	57,97	7,03	23,96	2,18	1,35	2,28
Madiun	5,72	1,67	48,56	8,29	26,73	4,48	0,69	6,49
Magetan	5,93	5,07	55,28	8,01	26,36	3,68	3,71	2,25
Ngawi	3,79	1,44	66,33	5,53	16,13	5,11	1,02	3,55
Bojonegoro	4,25	3,56	63,84	3,45	13,79	3,74	0,69	8,46
Tuban	7,68	3,72	69,75	4,09	13,50	3,64	2,13	1,71
Lamongan	4,91	8,10	57,69	10,38	15,90	5,55	1,05	0,82
Gresik	5,41	14,09	48,17	9,56	23,29	3,27	1,45	0,71
Bangkalan	4,36	0,68	66,84	2,90	20,42	5,41	0,26	0,06
Sampang	7,65	0,75	71,44	2,49	18,26	3,03	3,31	0,34
Pamekasan	6,19	0,72	55,30	1,91	24,99	13,97	2,41	1,49
Sumenep	3,97	2,24	58,35	7,82	20,33	5,45	1,73	1,98
Kediri	7,47	4,26	32,99	16,38	38,24	0,87	1,15	0,06
Blitar	7,35	4,29	45,79	5,58	41,93	0,56	0,97	1,60
Malang	7,73	6,05	35,94	14,17	37,38	0,18	1,67	2,18
Probolinggo	3,00	2,30	38,94	7,54	50,70	1,22	2,28	0,54
Pasuruan	5,08	2,68	46,20	7,17	40,33	0,32	0,96	2,00
Mojokerto	4,88	7,58	27,32	12,49	47,64	1,56	0,72	0,58
Madiun	14,26	3,23	34,77	9,05	39,39	0,48	0,76	0,57
Surabaya	10,01	10,98	25,17	22,22	32,21	0,17	0,67	2,11
Batu	6,27	11,16	49,93	7,79	15,70	5,26	2,79	2,43
Jawa Timur	5,32	5,19	54,76	8,60	22,72	3,41	1,70	2,67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

II

(10) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas / Puskesmas	UKBM	Praktek Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten								
Pacitan	5,66	5,48	58,26	5,59	22,01	4,49	2,72	2,19
Ponorogo	4,03	7,21	59,16	4,97	20,68	4,47	0,97	3,16
Trenggalek	7,27	2,88	55,49	8,39	25,41	0,70	1,08	5,62
Tulungagung	7,35	7,97	48,18	2,94	31,43	0,86	2,28	3,50
Blitar	5,20	3,35	60,96	10,86	14,08	0,67	3,57	16,50
Kediri	5,12	13,10	45,09	8,80	25,06	0,64	1,50	3,47
Malang	3,03	7,04	54,01	7,01	22,06	8,63	4,28	0,55
Lumajang	2,27	4,21	50,45	6,02	22,78	11,40	2,82	2,83
Jember	3,99	3,55	60,65	7,84	24,46	1,47	1,54	1,01
Banyuwangi	3,30	4,09	58,30	7,02	26,67	1,85	6,37	2,34
Bondowoso	1,07	2,94	68,88	2,60	18,15	3,74	2,97	0,76
Situbondo	12,64	3,82	50,58	6,57	25,34	5,34	4,50	0,26
Probolinggo	4,19	1,43	61,17	2,79	24,44	1,66	3,66	2,47
Pasuruan	6,09	3,19	50,97	9,49	30,01	3,31	1,45	0,73
Sidoarjo	7,24	12,20	44,49	11,00	21,72	1,44	2,61	1,10
Mojokerto	4,95	4,53	63,96	8,39	17,73	2,99	1,49	0,73
Jombang	3,76	3,32	47,15	10,13	30,47	4,40	2,46	3,30
Nganjuk	9,47	1,33	56,88	8,47	17,45	5,64	1,94	1,58
Madiun	9,12	2,27	60,35	3,49	27,94	2,16	0,24	0,44
Magetan	6,06	4,49	45,27	4,09	31,46	4,99	1,47	4,76
Ngawi	7,31	1,96	61,43	6,34	17,21	5,93	1,84	2,26
Bojonegoro	8,92	3,04	51,65	5,52	18,75	11,57	0,55	1,63
Tuban	4,51	5,63	66,75	3,63	13,24	3,23	1,73	3,77
Lamongan	5,47	5,39	61,42	6,82	18,49	1,76	1,84	0,29
Gresik	6,45	14,41	44,06	9,12	25,32	2,94	0,91	4,41
Bangkalan	4,96	1,98	49,39	6,37	24,42	12,39	3,10	1,14
Sampang	3,96	1,05	66,48	3,98	16,47	8,72	3,11	2,12
Pamekasan	5,04	4,88	40,73	5,35	30,38	10,98	3,85	2,86
Sumenep	3,28	1,50	56,51	3,06	23,09	8,44	2,84	4,29
Kediri	10,09	7,80	35,56	10,59	36,25	1,80	1,36	1,17
Blitar	8,44	5,07	41,04	4,86	42,82	0,89	2,56	2,52
Malang	9,71	8,67	36,30	10,42	35,77	0,14	1,02	0,87
Probolinggo	4,27	1,88	48,74	6,45	40,57	0,17	0,97	0,65
Pasuruan	7,61	1,65	38,73	7,73	45,57	0,32	0,67	3,39
Mojokerto	7,59	9,12	23,43	15,22	49,93	0,00	1,81	0,00
Madiun	17,25	8,19	30,37	6,65	39,41	0,36	1,49	2,33
Surabaya	12,54	8,16	25,54	14,29	36,97	0,87	1,04	1,98
Batu	5,47	14,10	49,03	4,53	24,09	1,82	1,81	4,50
Jawa Timur	6,08	5,68	51,79	7,61	24,77	3,80	2,33	2,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

IV

(1) Ketenagakerjaan

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2015

Kabupaten/Kota	TPAK (%)			TPT (%)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten						
1 Pacitan	79,44	80,28	80,64	0,99	1,08	0,97
2 Ponorogo	71,81	72,31	70,24	3,25	3,66	3,68
3 Trenggalek	77,46	74,00	74,43	4,04	4,20	2,46
4 Tulungagung	71,52	72,57	69,63	2,71	2,42	3,95
5 Blitar	71,99	69,12	67,57	3,64	3,08	2,79
6 Kediri	68,39	67,28	67,93	4,65	4,91	5,02
7 Malang	68,74	66,04	66,28	5,17	4,83	4,95
8 Lumajang	65,63	65,09	66,75	2,01	2,83	2,60
9 Jember	65,01	63,74	63,98	3,94	4,64	4,77
10 Banyuwangi	72,84	69,15	72,87	4,65	7,17	2,55
11 Bondowoso	67,48	70,55	71,33	2,04	3,72	1,75
12 Situbondo	68,62	66,47	68,90	3,01	4,15	3,57
13 Probolinggo	72,81	69,92	69,19	3,30	1,47	2,51
14 Pasuruan	70,72	70,91	67,70	4,34	4,43	6,41
15 Sidoarjo	67,37	67,94	67,49	4,12	3,88	6,30
16 Mojokerto	67,87	67,80	69,56	3,16	3,81	4,05
17 Jombang	64,18	64,82	68,79	5,59	4,39	6,11
18 Nganjuk	69,64	67,17	64,48	4,73	3,93	2,10
19 Madiun	69,86	68,73	66,12	4,63	3,38	6,99
20 Magetan	71,50	69,14	70,60	2,96	4,28	6,05
21 Ngawi	73,17	67,29	65,95	4,97	5,61	3,99
22 Bojonegoro	72,99	65,49	66,22	5,81	3,21	5,01
23 Tuban	70,01	64,00	67,18	4,30	3,63	3,03
24 Lamongan	70,50	66,64	68,63	4,93	4,30	4,10
25 Gresik	67,60	63,66	64,69	4,55	5,06	5,67
26 Bangkalan	70,61	69,44	69,64	6,78	5,68	5,00
27 Sampang	72,37	76,85	68,37	4,68	2,22	2,51
28 Pamekasan	77,97	75,08	70,05	2,17	2,14	4,26
29 Sumenep	75,59	74,10	69,99	2,56	1,01	2,07
Kota						
71 Kediri	64,18	67,77	65,70	7,92	7,66	8,46
72 Blitar	66,53	66,46	71,46	6,17	5,71	3,80
73 Malang	65,99	63,66	60,56	7,73	7,22	7,28
74 Probolinggo	63,70	66,94	63,61	4,48	5,16	4,01
75 Pasuruan	69,13	67,78	67,24	5,41	6,09	5,57
76 Mojokerto	70,18	68,07	69,87	5,73	4,42	4,88
77 Madiun	66,39	63,54	65,97	6,57	6,93	5,10
78 Surabaya	67,86	66,56	66,10	5,32	5,82	7,01
79 Batu	70,58	70,38	68,60	2,30	2,43	4,29
Jawa Timur	69,78	68,12	67,84	4,30	4,19	4,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

IV

(2) Ketenagakerjaan

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan Menurut kabupaten/Kota, 2013-2015

Kabupaten/Kota	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan/		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1 Pacitan	1 400 093	1 670 442	1 198 246
2 Ponorogo	1 604 986	1 501 542	1 411 937
3 Trenggalek	1 352 547	1 293 381	1 056 403
4 Tulungagung	1 234 013	1 009 183	1 301 805
5 Blitar	1 132 315	1 148 410	1 195 167
6 Kediri	1 404 240	1 288 162	1 263 646
7 Malang	1 183 584	1 211 987	1 247 118
8 Lumajang	1 141 207	1 024 381	918 805
9 Jember	983 390	945 869	1 007 079
10 Banyuwangi	977 505	1 257 888	1 207 374
11 Bondowoso	1 169 120	1 180 781	1 177 920
12 Situbondo	1 156 904	1 247 344	948 439
13 Probolinggo	1 427 047	1 385 743	1 258 387
14 Pasuruan	1 332 406	1 433 725	1 607 026
15 Sidoarjo	2 023 986	2 433 187	2 402 298
16 Mojokerto	1 454 225	1 615 005	1 761 486
17 Jombang	1 407 811	1 506 509	1 737 968
18 Nganjuk	1 526 864	1 873 558	1 223 948
19 Madiun	1 514 112	1 620 418	1 550 334
20 Magetan	1 778 370	1 731 968	1 979 090
21 Ngawi	1 446 375	1 643 734	1 830 873
22 Bojonegoro	1 444 924	1 230 647	1 688 996
23 Tuban	1 346 604	1 131 404	1 197 506
24 Lamongan	1 218 625	1 173 081	1 507 459
25 Gresik	1 950 360	2 100 462	2 507 632
26 Bangkalan	1 554 990	1 577 047	1 379 467
27 Sampang	961 599	907 918	1 122 769
28 Pamekasan	1 331 849	1 217 472	1 253 606
29 Sumenep	1 502 261	864 861	851 582
Kota			
71 Kediri	1 622 519	1 498 260	1 605 830
72 Blitar	1 696 530	2 010 864	2 081 554
73 Malang	1 893 817	1 344 869	1 991 809
74 Probolinggo	1 804 684	2 374 008	1 940 982
75 Pasuruan	1 921 726	1 888 852	1 751 459
76 Mojokerto	1 644 872	2 125 413	2 105 254
77 Madiun	1 802 250	1 094 638	1 634 206
78 Surabaya	1 716 755	1 867 678	2 197 552
79 Batu	1 419 261	1 089 204	1 536 004
Jawa Timur	1 522 205	1 574 956	1 676 543

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



(1) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan (%)					
	Lantai Bukan Tanah		Atap Beton, genteng, sirap, seng, as bes		Dinding tembok dan kayu	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1 Pacitan	83,98	84,51	100,00	100,00	89,91	91,92
2 Ponorogo	85,97	87,39	100,00	100,00	92,57	94,58
3 Trenggalek	89,58	90,66	100,00	99,83	96,03	94,77
4 Tulungagung	92,59	94,21	100,00	99,90	92,29	93,50
5 Blitar	94,75	94,16	100,00	99,65	92,07	94,06
6 Kediri	93,58	95,37	100,00	99,85	95,33	98,55
7 Malang	93,42	92,78	100,00	100,00	93,02	94,56
8 Lumajang	97,30	98,78	99,88	100,00	93,55	96,47
9 Jember	93,78	93,44	100,00	100,00	85,87	87,58
10 Banyuwangi	92,88	93,75	99,93	99,88	90,01	90,69
11 Bondowoso	78,92	80,87	100,00	100,00	75,48	74,86
12 Situbondo	79,77	78,81	100,00	99,60	82,82	83,70
13 Probolinggo	77,76	77,24	99,87	100,00	81,25	85,26
14 Pasuruan	92,84	94,26	100,00	99,72	96,11	96,09
15 Sidoarjo	99,69	98,99	100,00	99,92	99,43	99,63
16 Mojokerto	92,87	93,17	100,00	99,79	95,51	95,49
17 Jombang	88,65	90,49	100,00	100,00	95,17	92,70
18 Nganjuk	84,49	84,16	100,00	100,00	97,86	99,00
19 Madiun	77,02	83,07	100,00	100,00	96,07	97,38
20 Magetan	96,52	95,23	100,00	100,00	98,98	98,69
21 Ngawi	58,54	53,61	100,00	100,00	92,58	90,01
22 Bojonegoro	51,44	53,32	100,00	100,00	90,58	92,99
23 Tuban	69,30	70,19	99,71	99,81	93,24	94,50
24 Lamongan	82,06	81,93	100,00	100,00	93,46	94,92
25 Gresik	96,83	95,83	99,91	100,00	97,62	98,72
26 Bangkalan	82,99	88,82	100,00	100,00	87,52	88,45
27 Sampang	62,18	67,40	100,00	100,00	86,01	85,87
28 Pamekasan	70,16	80,05	99,89	100,00	73,27	82,47
29 Sumenep	95,97	95,62	99,79	99,57	94,76	97,36
Kota						
71 Kediri	98,85	99,58	100,00	100,00	99,22	99,67
72 Blitar	99,37	98,68	100,00	100,00	99,01	98,66
73 Malang	98,83	97,92	100,00	100,00	98,26	98,41
74 Probolinggo	99,62	98,98	100,00	100,00	97,42	97,47
75 Pasuruan	98,72	98,99	100,00	100,00	99,06	99,90
76 Mojokerto	98,33	98,65	100,00	100,00	96,54	97,08
77 Madiun	99,11	98,86	100,00	99,63	99,67	99,66
78 Surabaya	99,64	99,70	100,00	100,00	98,71	99,22
79 Batu	97,26	96,77	100,00	100,00	98,32	98,58
Jawa Timur	88,10	88,10	99,97	99,92	92,56	93,70

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



(2) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih, Jamban Milik Sendiri dilengkapi Tangki Septik, Sumber Penerangan Listrik Menurut Kabupaten/ Kota, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih (%)		Rumah Tangga dengan Jamban Milik Sendiri dilengkapi		Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1 Pacitan	70,94	57,00	92,19	87,75	99,37	99,91
2 Ponorogo	93,54	78,74	84,86	78,69	100,00	99,71
3 Trenggalek	81,00	59,49	87,77	76,43	100,00	100,00
4 Tulungagung	99,25	86,46	87,18	84,18	99,86	99,88
5 Blitar	95,64	81,88	90,56	83,07	99,91	100,00
6 Kediri	96,62	92,85	84,73	82,48	99,93	99,90
7 Malang	95,11	60,10	91,83	86,21	100,00	100,00
8 Lumajang	90,50	73,25	90,26	69,31	99,69	100,00
9 Jember	93,86	81,28	85,86	58,48	99,93	100,00
10 Banyuwangi	91,95	75,16	88,56	74,76	100,00	99,70
11 Bondowoso	88,67	65,33	67,91	28,78	99,74	99,70
12 Situbondo	98,13	85,90	77,98	34,51	99,67	99,73
13 Probolinggo	87,73	72,65	66,06	40,60	99,71	100,00
14 Pasuruan	96,10	71,97	93,73	66,89	100,00	99,80
15 Sidoarjo	99,92	81,84	87,32	86,04	100,00	100,00
16 Mojokerto	97,78	92,86	88,41	79,95	100,00	100,00
17 Jombang	99,00	94,78	83,43	76,48	99,91	100,00
18 Nganjuk	96,75	88,77	84,71	77,66	100,00	100,00
19 Madiun	99,32	82,33	86,27	82,02	100,00	99,76
20 Magetan	99,89	86,84	91,34	85,81	100,00	100,00
21 Ngawi	96,86	82,91	85,64	71,49	99,43	99,18
22 Bojonegoro	96,19	93,86	88,39	77,10	99,86	99,92
23 Tuban	98,27	92,37	92,34	70,10	100,00	99,80
24 Lamongan	95,84	90,38	93,50	83,57	100,00	100,00
25 Gresik	98,79	91,30	93,11	91,80	100,00	100,00
26 Bangkalan	91,67	85,40	89,01	80,76	98,12	99,71
27 Sampang	84,81	76,74	80,92	66,45	99,92	99,79
28 Pamekasan	90,31	84,48	81,98	60,74	99,94	100,00
29 Sumenep	95,92	89,39	76,56	54,51	99,63	98,16
Kota						
71 Kediri	99,81	100,00	82,86	84,90	100,00	100,00
72 Blitar	96,46	96,21	92,81	87,11	100,00	100,00
73 Malang	99,32	99,18	82,80	76,92	100,00	100,00
74 Probolinggo	99,71	100,00	83,75	75,09	100,00	100,00
75 Pasuruan	100,00	100,00	86,07	82,82	100,00	100,00
76 Mojokerto	99,72	100,00	85,27	84,03	100,00	99,80
77 Madiun	100,00	100,00	84,48	81,32	100,00	100,00
78 Surabaya	100,00	100,00	74,63	72,32	100,00	100,00
79 Batu	100,00	33,37	90,00	92,69	100,00	100,00
Jawa Timur	95,21	83,02	85,91	73,23	99,87	99,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



(3) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal dan Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal (%) , 2016				
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas Sewa	Rumah Dinas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	97,01	0,97	2,02	0,00	0,00
2 Ponorogo	94,46	0,72	4,49	0,18	0,14
3 Trenggalek	97,60	0,59	1,67	0,14	0,00
4 Tulungagung	93,87	0,79	4,93	0,20	0,22
5 Blitar	94,79	0,53	4,32	0,10	0,27
6 Kediri	92,93	2,61	4,11	0,27	0,08
7 Malang	95,88	1,34	2,15	0,33	0,29
8 Lumajang	97,50	1,72	0,68	0,10	0,00
9 Jember	91,11	1,65	6,94	0,00	0,31
10 Banyuwangi	92,14	1,77	5,71	0,38	0,00
11 Bondowoso	93,83	1,35	4,02	0,62	0,18
12 Situbondo	93,04	1,71	4,02	0,88	0,35
13 Probolinggo	95,87	0,87	3,04	0,22	0,00
14 Pasuruan	95,37	1,70	2,61	0,32	0,00
15 Sidoarjo	83,23	13,45	2,56	0,77	0,00
16 Mojokerto	93,88	1,76	3,93	0,31	0,12
17 Jombang	91,86	2,26	5,45	0,00	0,44
18 Nganjuk	93,70	1,50	4,34	0,17	0,29
19 Madiun	93,87	0,47	5,35	0,00	0,30
20 Magetan	95,87	1,03	2,67	0,13	0,30
21 Ngawi	96,21	0,50	3,16	0,13	0,00
22 Bojonegoro	97,89	0,82	1,29	0,00	0,00
23 Tuban	96,83	0,47	2,59	0,00	0,12
24 Lamongan	93,74	1,20	5,06	0,00	0,00
25 Gresik	90,15	5,09	3,67	0,75	0,34
26 Bangkalan	98,43	0,85	0,72	0,00	0,00
27 Sampang	94,49	0,54	4,97	0,00	0,00
28 Pamekasan	95,75	0,82	2,98	0,45	0,00
29 Sumenep	97,91	0,72	1,37	0,00	0,00
Kota					
71 Kediri	78,08	10,23	10,15	1,54	0,00
72 Blitar	77,67	12,21	8,80	1,10	0,22
73 Malang	70,05	21,95	6,88	1,12	0,00
74 Probolinggo	86,69	5,56	7,27	0,47	0,00
75 Pasuruan	86,10	7,32	6,07	0,17	0,34
76 Mojokerto	75,67	13,60	9,44	1,30	0,00
77 Madiun	65,69	15,82	15,72	1,48	1,30
78 Surabaya	63,69	23,24	9,21	1,33	2,53
79 Batu	91,10	5,78	2,05	0,49	0,57
Jawa Timur	90,76	4,32	4,25	0,36	0,31

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

(1) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), dan Garis Kemiskinan Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	88,9	16,18	2,43	0,54	220.810
2 Ponorogo	99,9	11,53	1,54	0,30	247.368
3 Trenggalek	90,0	13,10	1,98	0,44	250.666
4 Tulungagung	89,0	8,75	1,11	0,24	277.707
5 Blitar	116,7	10,22	1,21	0,23	244.382
6 Kediri	196,8	12,77	2,07	0,49	251.547
7 Malang	280,3	11,07	1,71	0,40	254.380
8 Lumajang	120,7	11,75	1,68	0,41	234.728
9 Jember	270,4	11,28	1,47	0,31	267.962
10 Banyuwangi	147,7	9,29	1,27	0,25	285.004
11 Bondowoso	111,9	14,76	2,28	0,60	299.819
12 Situbondo	87,7	13,15	2,59	0,76	246.483
13 Probolinggo	231,9	20,44	3,09	0,74	340.539
14 Pasuruan	170,7	10,86	1,68	0,46	283.327
15 Sidoarjo	133,8	6,40	0,76	0,15	346.538
16 Mojokerto	113,3	10,56	1,17	0,23	293.609
17 Jombang	133,5	10,80	1,29	0,27	301.162
18 Nganjuk	136,5	13,14	1,75	0,36	308.506
19 Madiun	81,2	12,04	1,56	0,33	265.310
20 Magetan	74,0	11,80	1,58	0,31	262.069
21 Ngawi	123,2	14,88	2,50	0,65	240.780
22 Bojonegoro	190,9	15,48	2,62	0,68	272.886
23 Tuban	191,1	16,64	2,48	0,60	265.659
24 Lamongan	186,1	15,68	2,40	0,55	289.403
25 Gresik	166,9	13,41	2,36	0,66	348.888
26 Bangkalan	212,2	22,38	3,28	0,70	305.174
27 Sampang	239,6	25,80	3,71	0,79	272.900
28 Pamekasan	148,8	17,74	2,60	0,57	266.953
29 Sumenep	218,9	20,49	3,54	0,91	270.890
Kota					
71 Kediri	22,1	7,95	0,91	0,17	366.788
72 Blitar	9,8	7,15	0,78	0,16	319.177
73 Malang	40,6	4,80	0,61	0,12	381.400
74 Probolinggo	19,0	8,37	0,94	0,18	383.673
75 Pasuruan	14,2	7,34	1,22	0,30	328.648
76 Mojokerto	8,0	6,42	0,67	0,14	328.250
77 Madiun	8,5	4,86	0,66	0,16	338.609
78 Surabaya	164,4	5,79	0,78	0,16	393.151
79 Batu	9,1	4,59	0,35	0,05	355.317
Jawa Timur	4.748,4	12,28	1,86	0,45	289.945

Sumber: BPS Republik Indonesia



(2) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), dan Garis Kemiskinan Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P_1	P_2	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	92,1	16,68	2,92	0,90	228.573
2 Ponorogo	103,2	11,91	1,63	0,33	251.525
3 Trenggalek	92,2	13,39	2,18	0,59	260.133
4 Tulungagung	87,4	8,57	1,27	0,30	292.483
5 Blitar	114,1	9,97	1,61	0,38	255.966
6 Kediri	199,4	12,91	2,05	0,45	261.088
7 Malang	292,9	11,53	2,05	0,55	265.629
8 Lumajang	118,5	11,52	1,65	0,41	245.806
9 Jember	269,5	11,22	1,58	0,33	283.510
10 Banyuwangi	146,0	9,17	1,02	0,20	295.185
11 Bondowoso	113,7	14,96	1,93	0,39	313.734
12 Situbondo	91,2	13,63	2,25	0,59	254.656
13 Probolinggo	237,0	20,82	3,58	0,97	355.051
14 Pasuruan	169,2	10,72	1,43	0,31	292.281
15 Sidoarjo	136,1	6,44	0,77	0,14	371.947
16 Mojokerto	113,9	10,57	1,67	0,43	311.022
17 Jombang	133,8	10,79	1,59	0,39	316.922
18 Nganjuk	132,0	12,69	1,73	0,42	322.820
19 Madiun	84,7	12,54	1,95	0,46	277.092
20 Magetan	71,2	11,35	1,69	0,38	272.972
21 Ngawi	129,3	15,61	2,49	0,59	250.008
22 Bojonegoro	194,0	15,71	2,01	0,42	284.319
23 Tuban	196,6	17,08	2,98	0,79	277.599
24 Lamongan	182,6	15,38	2,25	0,58	303.780
25 Gresik	170,8	13,63	2,58	0,67	372.661
26 Bangkalan	216,2	22,57	3,31	0,78	319.120
27 Sampang	240,4	25,69	5,18	1,44	284.928
28 Pamekasan	146,9	17,41	3,24	0,88	278.093
29 Sumenep	216,8	20,20	2,39	0,45	284.756
Kota					
71 Kediri	23,8	8,51	1,40	0,43	386.521
72 Blitar	10,0	7,29	0,89	0,18	338.532
73 Malang	39,1	4,60	0,53	0,11	411.709
74 Probolinggo	18,7	8,17	1,36	0,37	403.037
75 Pasuruan	14,5	7,47	1,46	0,44	343.392
76 Mojokerto	7,7	6,16	1,08	0,26	348.670
77 Madiun	8,6	4,89	0,56	0,10	359.771
78 Surabaya	165,7	5,82	0,78	0,15	418.930
79 Batu	9,4	4,71	0,62	0,13	380.393
Jawa Timur	4.789,1	12,34	2,06	0,52	305.171

Sumber: BPS Republik Indonesia

(3) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), dan Garis Kemiskinan Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P_1	P_2	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1 Pacitan	85,53	15,49	2,86	0,79	239.339
2 Ponorogo	102,06	11,75	1,47	0,28	266.312
3 Trenggalek	91,49	13,24	1,74	0,37	275.426
4 Tulungagung	84,35	8,23	0,98	0,18	304.518
5 Blitar	113,51	9,88	1,53	0,35	272.358
6 Kediri	197,43	12,72	1,66	0,37	272.374
7 Malang	293,74	11,49	1,57	0,33	282.933
8 Lumajang	115,91	11,22	1,62	0,35	258.840
9 Jember	265,10	10,97	1,33	0,29	299.823
10 Banyuwangi	140,45	8,79	1,41	0,34	311.722
11 Bondowoso	114,63	15,00	2,54	0,64	331.975
12 Situbondo	89,68	13,34	1,79	0,39	270.406
13 Probolinggo	240,47	20,98	3,24	0,80	373.569
14 Pasuruan	168,06	10,57	1,56	0,33	306.311
15 Sidoarjo	136,79	6,39	0,95	0,23	394.401
16 Mojokerto	115,38	10,61	1,53	0,35	330.940
17 Jombang	133,32	10,70	1,26	0,25	337.217
18 Nganjuk	127,90	12,25	1,72	0,36	341.653
19 Madiun	85,97	12,69	2,08	0,56	294.451
20 Magetan	69,24	11,03	1,37	0,26	288.246
21 Ngawi	126,65	15,27	2,30	0,52	264.706
22 Bojonegoro	180,99	14,60	2,41	0,54	295.250
23 Tuban	198,35	17,14	3,03	0,82	294.543
24 Lamongan	176,92	14,89	2,40	0,66	321.002
25 Gresik	167,12	13,19	2,19	0,56	393.447
26 Bangkalan	205,71	21,41	4,00	1,13	334.338
27 Sampang	227,80	24,11	4,19	1,05	296.268
28 Pamekasan	142,32	16,70	2,38	0,54	292.631
29 Sumenep	216,14	20,09	2,90	0,75	301.781
Kota					
71 Kediri	23,64	8,40	0,96	0,20	400.096
72 Blitar	9,97	7,18	1,04	0,20	356.147
73 Malang	37,03	4,33	0,54	0,09	426.527
74 Probolinggo	18,37	7,97	0,98	0,20	418.480
75 Pasuruan	14,93	7,62	1,35	0,32	362.224
76 Mojokerto	7,24	5,73	0,62	0,13	364.021
77 Madiun	9,05	5,16	0,94	0,26	376.956
78 Surabaya	161,01	5,63	0,92	0,25	438.283
79 Batu	9,05	4,48	0,55	0,11	398.401
Jawa Timur	4.703,30	12,05	1,98	0,47	321.761

Sumber: BPS Republik Indonesia

VII

(4) Kemiskinan

Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014		2015		2016	
	15-24 Tahun	15-55 Tahun	15-24 Tahun	15-55 Tahun	15-24 Tahun	15-55 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1 Pacitan	100,00	97,56	100,00	99,18	99,32	98,71
2 Ponorogo	100,00	97,98	100,00	97,26	100,00	96,87
3 Trenggalek	100,00	95,67	97,53	95,72	100,00	99,29
4 Tulungagung	100,00	100,00	100,00	97,02	100,00	99,00
5 Blitar	97,39	95,84	100,00	97,07	96,86	96,25
6 Kediri	98,93	95,15	100,00	98,68	100,00	96,63
7 Malang	100,00	94,70	100,00	94,77	98,12	96,52
8 Lumajang	98,06	96,82	100,00	93,99	97,52	92,61
9 Jember	100,00	81,87	100,00	92,56	97,13	94,22
10 Banyuwangi	100,00	96,01	100,00	92,43	100,00	92,31
11 Bondowoso	100,00	91,56	100,00	90,05	96,25	87,53
12 Situbondo	100,00	84,23	96,07	85,24	100,00	86,18
13 Probolinggo	100,00	88,40	100,00	92,26	99,05	89,35
14 Pasuruan	100,00	92,87	100,00	92,11	100,00	96,39
15 Sidoarjo	100,00	99,33	100,00	100,00	100,00	98,79
16 Mojokerto	100,00	99,45	100,00	99,35	100,00	99,47
17 Jombang	100,00	98,23	100,00	97,18	100,00	96,30
18 Nganjuk	100,00	95,32	100,00	98,73	100,00	97,65
19 Madiun	100,00	97,08	100,00	96,33	100,00	92,43
20 Magetan	100,00	100,00	100,00	99,13	100,00	95,03
21 Ngawi	100,00	91,72	100,00	95,01	100,00	92,19
22 Bojonegoro	100,00	89,79	100,00	94,96	100,00	96,58
23 Tuban	98,06	90,60	100,00	87,24	98,90	93,60
24 Lamongan	100,00	94,95	100,00	98,60	100,00	96,78
25 Gresik	100,00	97,73	100,00	99,67	100,00	99,54
26 Bangkalan	100,00	83,67	98,20	86,61	100,00	87,01
27 Sampang	97,44	79,98	100,00	80,91	96,65	82,17
28 Pamekasan	98,61	86,26	96,79	84,09	98,85	88,38
29 Sumenep	99,47	88,55	100,00	83,40	100,00	89,14
Kota						
71 Kediri	100,00	100,00	100,00	100,00	88,16	97,11
72 Blitar	100,00	100,00	100,00	96,85	100,00	100,00
73 Malang	100,00	100,00	100,00	96,53	100,00	96,00
74 Probolinggo	100,00	98,44	100,00	98,49	100,00	100,00
75 Pasuruan	100,00	97,03	100,00	99,20	100,00	100,00
76 Mojokerto	100,00	98,30	100,00	100,00	100,00	100,00
77 Madiun	100,00	100,00	100,00	95,79	100,00	94,25
78 Surabaya	100,00	96,41	100,00	100,00	100,00	98,29
79 Batu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,93
Jawa Timur	99,54	92,23	99,64	93,31	99,14	93,88

Sumber: BPS Republik Indonesia



(5) Kemiskinan

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014		2015		2016	
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1 Pacitan	100,00	100,00	100,00	96,32	100,00	90,26
2 Ponorogo	100,00	100,00	98,02	92,83	100,00	92,59
3 Trenggalek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Tulungagung	100,00	100,00	95,17	100,00	100,00	94,66
5 Blitar	100,00	93,57	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kediri	96,08	87,80	97,66	90,85	94,24	94,61
7 Malang	100,00	85,67	100,00	91,72	100,00	87,80
8 Lumajang	97,41	86,24	100,00	85,73	92,95	100,00
9 Jember	91,79	79,03	100,00	88,55	97,92	90,45
10 Banyuwangi	96,14	100,00	100,00	79,33	100,00	73,70
11 Bondowoso	96,05	90,92	100,00	83,34	100,00	88,14
12 Situbondo	100,00	100,00	100,00	64,32	89,87	83,86
13 Probolinggo	97,36	86,39	95,53	88,13	96,94	100,00
14 Pasuruan	100,00	76,29	100,00	89,56	100,00	96,28
15 Sidoarjo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,25
16 Mojokerto	100,00	100,00	100,00	100,00	98,82	87,84
17 Jombang	100,00	97,13	100,00	81,46	100,00	100,00
18 Nganjuk	98,29	94,60	100,00	94,00	100,00	100,00
19 Madiun	95,99	95,83	100,00	100,00	94,06	91,94
20 Magetan	97,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21 Ngawi	100,00	97,79	100,00	100,00	100,00	100,00
22 Bojonegoro	100,00	94,58	100,00	100,00	100,00	93,56
23 Tuban	100,00	91,22	100,00	92,02	100,00	81,45
24 Lamongan	100,00	100,00	96,94	95,00	100,00	100,00
25 Gresik	100,00	90,79	100,00	100,00	100,00	100,00
26 Bangkalan	97,35	71,72	100,00	77,14	100,00	94,13
27 Sampang	99,09	90,11	98,52	88,89	99,49	88,80
28 Pamekasan	99,28	95,97	100,00	96,22	100,00	94,94
29 Sumenep	100,00	100,00	97,52	97,12	100,00	92,00
Kota						
71 Kediri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72 Blitar	100,00	81,97	100,00	100,00	100,00	100,00
73 Malang	100,00	100,00	100,00	80,80	100,00	100,00
74 Probolinggo	94,22	100,00	100,00	100,00	100,00	91,73
75 Pasuruan	95,05	72,96	100,00	100,00	100,00	99,36
76 Mojokerto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
77 Madiun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78 Surabaya	100,00	100,00	100,00	91,08	100,00	79,02
79 Batu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	98,55	91,27	99,32	90,97	99,08	92,50

Sumber: BPS Republik Indonesia



(6) Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
	< SD	SD-SLTP	≥ SLTA	< SD	SD-SLTP	≥ SLTA	< SD	SD-SLTP	≥ SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1 Pacitan	35,47	57,10	7,42	26,68	70,23	3,10	25,47	64,54	9,99
2 Ponorogo	34,98	58,88	6,14	38,47	56,13	5,40	41,01	49,90	9,10
3 Trenggalek	33,96	61,34	4,70	31,02	62,36	6,62	28,09	65,97	5,94
4 Tulungagung	27,60	55,71	16,68	29,38	55,12	15,50	15,01	70,76	14,23
5 Blitar	32,86	52,57	14,56	30,11	63,95	5,94	28,46	64,61	6,93
6 Kediri	30,56	55,53	13,90	28,58	61,47	9,95	30,87	52,86	16,27
7 Malang	47,26	47,51	5,24	42,03	52,05	5,92	33,37	59,95	6,69
8 Lumajang	35,87	55,25	8,88	38,33	54,66	7,01	38,23	56,35	5,42
9 Jember	51,49	44,76	3,75	43,88	50,17	5,96	49,70	44,75	5,55
10 Banyuwangi	36,09	55,98	7,93	46,89	44,85	8,26	46,11	45,41	8,48
11 Bondowoso	54,90	40,99	4,10	60,18	36,28	3,54	52,89	39,27	7,84
12 Situbondo	51,74	39,80	8,45	55,70	40,15	4,16	46,71	42,74	10,54
13 Probolinggo	48,52	46,63	4,85	50,10	40,81	9,09	47,68	44,81	7,51
14 Pasuruan	36,60	56,46	6,94	43,45	47,62	8,94	38,36	55,40	6,24
15 Sidoarjo	18,99	51,66	29,34	11,50	59,03	29,47	17,69	54,40	27,92
16 Mojokerto	22,84	50,78	26,38	25,70	61,29	13,01	19,26	60,89	19,85
17 Jombang	33,11	55,38	11,51	32,53	52,66	14,81	25,16	59,94	14,90
18 Nganjuk	22,83	63,72	13,45	27,94	64,78	7,28	31,57	59,24	9,19
19 Madiun	29,21	49,12	21,66	38,43	53,16	8,40	35,96	51,07	12,98
20 Magetan	29,43	58,28	12,29	30,93	52,87	16,20	33,17	45,10	21,73
21 Ngawi	38,83	49,81	11,36	34,74	58,03	7,23	33,11	53,13	13,76
22 Bojonegoro	36,51	53,28	10,21	32,28	59,18	8,54	24,24	63,17	12,06
23 Tuban	35,74	56,04	8,22	38,91	50,72	10,37	34,28	53,05	12,67
24 Lamongan	28,70	47,87	23,43	35,02	45,73	19,25	31,62	51,54	16,83
25 Gresik	23,44	50,83	25,73	11,21	57,64	31,15	21,19	59,06	19,74
26 Bangkalan	49,84	45,27	4,90	43,29	54,67	2,04	45,48	50,30	4,22
27 Sampang	58,04	36,19	5,77	56,08	40,63	3,28	51,62	41,66	6,73
28 Pamekasan	40,61	43,75	15,64	48,66	44,85	6,49	36,05	54,70	12,24
29 Sumenep	45,42	43,28	11,30	51,79	38,97	9,24	45,20	45,54	9,26
Kota									
71 Kediri	13,95	60,81	25,24	12,84	61,77	25,39	14,36	53,97	31,67
72 Blitar	15,79	65,40	18,81	15,50	55,00	29,50	21,57	52,57	25,86
73 Malang	26,57	60,95	12,49	18,69	66,78	14,52	24,16	60,92	14,92
74 Probolinggo	30,98	41,79	27,23	24,33	53,97	21,70	25,88	48,71	25,41
75 Pasuruan	43,61	36,44	19,96	27,59	44,77	27,64	22,98	56,71	20,31
76 Mojokerto	24,26	47,25	28,50	12,98	51,99	35,03	20,27	55,88	23,85
77 Madiun	14,98	47,36	37,66	14,20	42,93	42,87	23,56	41,21	35,23
78 Surabaya	26,36	43,45	30,19	10,87	56,93	32,20	15,41	58,98	25,61
79 Batu	37,00	50,20	12,81	31,44	51,61	16,95	10,69	59,72	29,59
Jawa Timur	37,93	50,06	12,01	37,36	51,96	10,68	35,15	53,17	11,68

Sumber: BPS Republik Indonesia



(7) Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
	Tidak Bekerja	Bekerja Di Sektor Informal	Bekerja Di Sektor Formal	Tidak Bekerja	Bekerja Di Sektor Informal	Bekerja Di Sektor Formal	Tidak Bekerja	Bekerja Di Sektor Informal	Bekerja Di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1 Pacitan	15,70	76,51	7,79	21,27	69,39	9,34	22,62	70,59	6,79
2 Ponorogo	30,12	66,13	3,75	30,91	63,75	5,34	31,17	61,17	7,66
3 Trenggalek	27,86	67,33	4,82	28,37	63,65	7,98	39,91	48,88	11,22
4 Tulungagung	30,77	52,40	16,83	44,16	43,84	12,00	37,28	42,23	20,48
5 Blitar	38,12	50,11	11,77	33,73	54,59	11,69	36,83	41,40	21,77
6 Kediri	36,30	50,56	13,14	40,45	46,93	12,62	44,01	36,34	19,65
7 Malang	41,19	49,99	8,82	32,04	50,20	17,76	41,79	32,52	25,68
8 Lumajang	39,40	42,07	18,53	44,55	38,06	17,38	43,80	39,59	16,60
9 Jember	43,45	42,61	13,94	39,86	41,98	18,16	46,31	40,61	13,09
10 Banyuwangi	43,42	33,00	23,58	35,23	40,83	23,94	43,83	33,30	22,87
11 Bondowoso	36,89	50,87	12,24	30,65	57,22	12,13	0,12	48,45	11,43
12 Situbondo	36,66	52,26	11,08	37,81	50,72	11,46	37,12	50,83	12,06
13 Probolinggo	33,75	56,29	9,96	34,65	53,37	11,98	33,68	57,07	9,25
14 Pasuruan	35,41	43,97	20,62	39,94	42,98	17,07	42,62	33,80	23,58
15 Sidoarjo	42,42	21,73	35,86	43,46	27,04	29,50	54,48	20,50	25,02
16 Mojokerto	42,00	36,32	21,68	40,16	38,83	21,00	39,05	33,76	27,19
17 Jombang	38,04	49,92	12,04	41,97	43,00	15,03	44,91	34,55	20,55
18 Nganjuk	38,08	50,36	11,56	46,98	42,40	10,62	43,22	40,68	16,10
19 Madiun	38,26	50,85	10,89	35,24	53,38	11,38	48,55	41,52	9,94
20 Magetan	26,42	67,05	6,53	35,40	56,34	8,26	37,70	52,80	9,51
21 Ngawi	39,07	49,66	11,26	29,37	52,67	17,95	33,60	59,45	6,95
22 Bojonegoro	35,65	53,57	10,78	33,96	52,87	13,17	42,95	44,66	12,39
23 Tuban	38,73	47,59	13,68	29,89	56,48	13,62	42,15	41,35	16,50
24 Lamongan	33,66	50,09	16,25	33,49	50,17	16,34	40,15	43,49	16,36
25 Gresik	38,84	41,36	19,79	46,91	35,21	17,88	47,94	36,84	15,21
26 Bangkalan	36,59	55,24	8,16	34,02	59,61	6,37	31,49	61,47	7,04
27 Sampang	21,57	71,10	7,33	29,06	66,51	4,43	24,51	68,19	7,30
28 Pamekasan	25,45	63,62	10,93	36,19	59,01	4,80	24,47	69,47	6,05
29 Sumenep	30,04	60,24	9,73	26,69	66,12	7,19	28,42	59,03	12,55
Kota									
71 Kediri	42,61	25,63	31,77	48,43	33,28	18,29	36,08	31,00	32,92
72 Blitar	34,45	39,08	26,47	46,51	23,11	30,38	31,39	27,63	40,98
73 Malang	43,61	30,23	26,16	46,34	18,40	35,26	34,81	25,62	39,57
74 Probolinggo	33,17	37,28	29,55	40,10	34,24	25,66	38,26	20,16	11,58
75 Pasuruan	33,32	27,42	39,27	44,40	31,66	23,94	40,67	11,02	48,31
76 Mojokerto	33,80	33,75	32,45	34,25	31,82	33,92	44,05	19,94	36,01
77 Madiun	38,18	27,88	33,94	40,69	31,12	28,19	46,21	30,07	23,72
78 Surabaya	33,96	30,07	35,97	43,29	32,08	24,63	45,27	22,21	32,51
79 Batu	44,50	36,80	18,70	40,24	34,73	25,03	34,35	47,59	18,05
Jawa Timur	35,53	50,17	14,30	35,95	49,84	14,21	38,92	44,96	16,12

Sumber: BPS Republik Indonesia



(8) Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014		2015		2016	
	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	71,79	12,51	66,60	12,12	61,17	16,21
2 Kab. Ponorogo	51,17	18,71	54,49	14,61	55,70	13,13
3 Kab. Trenggalek	59,35	12,79	57,29	14,34	43,89	16,20
4 Kab. Tulungagung	30,05	39,18	28,74	27,10	32,15	30,57
5 Kab. Blitar	32,14	29,74	39,49	26,79	37,65	25,52
6 Kab. Kediri	30,78	32,92	31,50	28,05	25,38	30,61
7 Kab. Malang	31,70	27,12	36,85	31,11	28,80	29,41
8 Kab. Lumajang	30,42	30,18	32,70	22,75	36,39	19,81
9 Kab. Jember	40,78	15,77	34,31	25,83	33,85	19,85
10 Kab. Banyuwangi	25,12	31,46	30,85	33,91	28,72	27,46
11 Kab. Bondowoso	34,78	28,33	48,03	21,32	44,82	15,06
12 Kab. Situbondo	32,11	31,23	40,84	21,35	37,05	25,83
13 Kab. Probolinggo	40,94	25,31	40,43	24,92	46,26	20,06
14 Kab. Pasuruan	36,93	27,65	26,06	33,99	21,92	35,46
15 Kab. Sidoarjo	6,94	50,65	3,98	52,55	4,33	41,19
16 Kab. Mojokerto	11,38	46,62	16,82	43,02	10,39	50,56
17 Kab. Jombang	19,45	42,51	19,73	38,31	24,94	30,15
18 Kab. Nganjuk	32,24	29,67	26,14	26,89	34,81	21,97
19 Kab. Madiun	35,04	26,70	29,80	34,96	24,97	26,48
20 Kab. Magetan	45,63	27,95	39,72	24,89	34,89	27,41
21 Kab. Ngawi	40,09	20,84	51,95	18,67	49,51	16,89
22 Kab. Bojonegoro	42,04	22,31	48,17	17,87	42,25	14,80
23 Kab. Tuban	40,44	20,83	44,98	25,13	30,70	27,15
24 Kab. Lamongan	40,06	26,28	39,38	27,13	34,06	25,80
25 Kab. Gresik	30,67	30,48	17,58	35,51	19,76	32,30
26 Kab. Bangkalan	49,38	14,03	55,59	10,38	56,64	11,87
27 Kab. Sampang	58,69	19,74	59,39	11,55	57,72	17,77
28 Kab. Pamekasan	55,61	18,94	51,43	12,38	64,89	10,63
29 Kab. Sumenep	52,76	17,20	55,37	17,93	53,50	18,09
30 Kota Kediri	3,52	53,87	0,00	51,57	7,50	56,42
31 Kota Blitar	9,21	56,34	1,10	52,39	3,31	65,30
32 Kota Malang	7,79	48,60	0,00	53,66	0,00	65,19
33 Kota Probolinggo	10,41	56,41	9,14	50,75	1,99	59,75
34 Kota Pasuruan	8,02	58,67	4,54	51,06	10,04	49,29
35 Kota Mojokerto	4,56	61,64	3,92	61,83	2,39	53,55
36 Kota Madiun	0,00	61,82	7,62	51,69	0,00	53,79
37 Kota Surabaya	2,56	63,48	2,55	54,16	0,62	54,11
38 Kota Batu	17,35	38,15	23,49	36,27	27,28	38,36
Jawa Timur	36,56	27,91	37,38	26,67	35,57	25,51

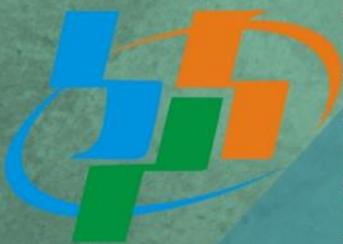
Sumber: BPS Republik Indonesia

<https://surabayakota.bps.go.id>

<https://surabayakota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
Jl. Ahmad Yani 152 E, Surabaya 60231
tlp : (031)8296692 Fax : (031)8296691
e-mail : bps3578@bps.go.id
website : surabayakota.bps.go.id